

ABSTRAK

Penerapan *corporate governance* dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan pengelolaan manajemen dan akuntabilitas yang baik demi kredibilitas perusahaan. Kurangnya penerapan *corporate governance* dapat menyebabkan kecurangan oleh manajemen untuk melakukan manipulasi data. Hal ini timbul karena tindakan oportunistis manajer untuk kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *corporate governance*, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 dan 2010. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan didapatkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 26 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Penelitian ini menggunakan variabel dependen (manajemen laba) dan variabel independen (proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas auditor, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan) dan variabel kontrol (*leverage*).

Hasil analisis menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan kualitas auditor berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba. Komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba.

Kata kunci : Manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas auditor, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perbankan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010)

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Syafruddin, M.Si. Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi bimbingan dan masukan kepada penulis dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Seluruh staff TU dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

6. Orangtuaku tercinta Drs. Hangkie Mugihardjo dan Suryaningsih Budiastuti, S.H. yang senanstiasa memberikan doa, pelajaran serta dukungan semangat yang tak pernah putus kepada penulis selama ini.
7. Kakak-kakakku tercinta Mba Amel dan Mas Doni yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Bagus, Doddy, Dani, dan Anton yang telah memberikan banyak bantuan, info bahan skripsi, dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan, Putra, Roy, Panca, Ramadhan, Septian, Afnan, Rendy, Caca, Gea, dan teman-teman Akuntansi angkatan 2009 yang telah saling menyemangati dan mendo'akan,
10. Mba Nadia, Mas Andi, dan Mas Indra terima kasih atas info-info skripsinya.
11. Teman-teman tim KKN Kec. Bojong Pekalongan Desa Jajarwayang Danu, Andre, Hendry, Aldo, Tia, Myrna, Yuan, Karin, dan Dian, terima kasih atas kekeluargaannya.
12. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai tambahan informasi dan pengetahuan.

Semarang, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 <i>Corporate Governance</i>	14
2.1.2.1 Komisaris Independen	16

2.1.2.2 Komite Audit	18
2.1.2.3 Kualitas Auditor	20
2.1.3 Struktur Kepemilikan	24
2.1.3.1 Kepemilikan Manajerial	24
2.1.3.2 Kepemilikan Institusional	25
2.1.4 Ukuran Perusahaan	26
2.1.5 Manajemen Laba	28
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Pemikiran	36
2.4 Pengembangan Hipotesis	38
2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Earnings Management</i>	38
2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Earnings Management</i>	38
2.4.3 Pengaruh Kualitas Auditor terhadap <i>Earnings Management</i> ...	39
2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Earning Management</i>	40
2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Earning Management</i>	41
2.4.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Earning Management</i>	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44
3.1.1 Variabel Penelitian	44
3.1.2 Definisi Operasional	44

3.1.2.1 Variabel Dependen	44
3.1.2.2 Variabel Independen	46
3.1.2.3 Variabel Kontrol	48
3.2 Populasi dan Sampel.....	48
3.3 Jenis dan Sumber Data	49
3.4 Metode Pengumpulan Data	49
3.5 Metode Analisis	50
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	50
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	50
3.5.2.1 Uji Normalitas	51
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	52
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	52
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	53
3.5.3 Uji Hipotesis	53
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	56
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	56
4.2 Analisis Data	57
4.2.1 Statistik Deskriptif	57
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	60
4.2.2.1 Uji Normalitas	60
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas	61
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	62
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	63
4.2.3 Pengujian Hipotesis	64

4.2.3.1 Uji F (F Test)	64
4.2.3.2 Koefisien Determinasi	65
4.2.3.3 Uji Parsial (T Test)	66
4.3 Interpretasi Hasil	69
4.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba	69
4.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba	70
4.3.3 Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Manajemen Laba	70
4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba	71
4.3.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba	72
4.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba	73
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Keterbatasan	75
5.3 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Data Hasil Pemilihan Sampel	56
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	57
Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif Frekuensi	58
Tabel 4.4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	61
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas	62
Tabel 4.6 Hasil Run Test	64
Tabel 4.7 Hasil Uji F (F Test)	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	65
Tabel 4.9 Hasil Uji T	66
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas-Grafik Normal Plot	60
Gambar 4.2 <i>Scatter Plot</i>	63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel	82
Lampiran B Data Perusahaan	83
Lampiran C Data Perhitungan TA	89
Lampiran D Data Perhitungan DACC	92
Lampiran E Hasil Regresi	95

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan digunakan sebagai alat komunikasi antara pihak internal perusahaan (manajemen) dengan pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang dapat menyediakan berbagai informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, maupun perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal dan juga membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

Laporan keuangan dapat disusun dengan berbagai pilihan metode akuntansi yang digunakan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut Sulistyanto (2008) prinsip akuntansi telah dibuat dengan sebaik-baiknya, namun prinsip ini memiliki keterbatasan yang dikarenakan fleksibilitas yang diperbolehkannya. Manajemen mempunyai fleksibilitas untuk memilih cara-cara alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus opsi-opsi yang ada dalam perlakuan akuntansi yang sama. Fleksibilitas ini dimaksudkan untuk dapat beradaptasi terhadap berbagai situasi ekonomi.

Akuntansi berbasis akrual dipilih untuk menyusun laporan keuangan karena dapat merefleksikan kondisi keuangan perusahaan secara nyata dan

lebih rasional. Namun metode ini juga memiliki kelemahan. Wild *et al.* (2003) mengatakan bahwa akuntansi akrual merupakan aturan yang tidak sempurna dan mengaburkan laporan keuangan yang bertujuan memberikan informasi aliran kas dan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan kas. Akuntansi akrual yang rumit dan rentan atas manipulasi mengakibatkan kekaburan informasi pada laporan keuangan. Kerentanan ini dapat menimbulkan manajemen laba.

Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan (Belkaoui, 2006). Manajemen laba digunakan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan pada waktu tertentu untuk kepentingan manajemen maupun *stakeholder*. Menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam (Belkaoui, 2006) menyatakan bahwa :

Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan beberapa pemangku kepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Ketika manajemen tidak berhasil dalam mencapai target labanya, sehingga manajemen akan melakukan modifikasi dalam pelaporannya dengan cara memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat menunjukkan pencapaian laba yang lebih baik agar memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik.

Kelemahan akuntansi akrual memberikan kesempatan bagi manajemen untuk menerapkan strategi manajemen laba. Strategi ini termasuk menjadi

pilihan metode/kebijakan akuntansi dan *discretionary accruals* (kebijakan pengestimasi akuntansi). Salah satu cara untuk mengukur manajemen laba dapat menggunakan proksi *Discretionary Accruals*. Menurut Gumanti (2000), *Discretionary Accrual* adalah komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajer, artinya manajer memberi intervensinya dalam proses pelaporan akuntansi.

Manajemen laba dapat memberikan dampak terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan investasi bagi investor karena investor tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya.

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh penerapan *corporate governance* yang dilihat dari dewan komisaris independen, komite audit, kualitas auditor, dan juga struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan perbankan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, (dengan *leverage* sebagai variabel kontrol).

Corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan pada perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Penerapan *corporate governance* dapat mengurangi perbedaan kepentingan antara *shareholder* dengan manajemen. Konsep ini ditujukan demi terciptanya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan dengan melakukan supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*.

Kurangnya penerapan *corporate governance* dapat menyebabkan munculnya kesempatan bagi manajemen untuk melakukan manipulasi data. Pada tahun 2001, terjadi kasus pada PT. Kimia Farma Tbk. yang melakukan *mark up* laba dan pada tahun 2002 PT. Lippo Tbk. melakukan pembukuan ganda (Boediono, 2005). Bukti tersebut menunjukkan bahwa lemahnya penerapan praktek *corporate governance* pada perusahaan publik akan menimbulkan manipulasi laporan keuangan.

Praktek *corporate governance* diperlukan untuk mencegah manajemen laba yang berlebihan. Struktur *corporate governance* yang baik akan mengurangi manajemen laba. Lee *et al.* (2007) menemukan bahwa manajemen laba berhubungan positif dengan keterkaitan organisasional (manajemen laba cenderung terjadi pada perusahaan dengan keterkaitan organisasional tinggi). Namun dengan disertainya proporsi dewan komisaris independen yang besar dan kepemilikan ekuitas institusional yang tinggi dapat mengurangi manajemen laba pada perusahaan dengan keterkaitan organisasional tinggi.

Komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengawasan dan menjaga kualitas laporan keuangan. Komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan

keuangan. Dengan adanya komite audit yang dapat menjalankan perannya secara efektif, maka pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik. Konflik keagenan yang muncul akibat motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dapat diminimalisasi.

Melalui praktek *corporate governance* dapat memungkinkan pengambilan keputusan-keputusan yang relatif baik. Pemilihan auditor sesuai dengan spesialisasi auditor dalam industri yang diaudit, seperti perbankan. Balsam et al. (2003) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis mempunyai *discretionary accruals* lebih rendah dan koefisien respon laba lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor non-spesialis. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi auditor yang tinggi dapat menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga memungkinkan untuk mengurangi manajemen laba pada perusahaan yang diaudit.

Motivasi manajer pada perusahaan sangat menentukan bagaimana tindakan manajemen laba. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola (Boediono, 2005).

Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan (Lastanti, 2005). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba.

Menurut Ningsaptiti (2010), Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Perusahaan yang berukuran besar dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk kepentingan investasi karena perusahaan besar cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga dalam melakukan pelaporan dapat lebih berhati-hati. Perusahaan-perusahaan besar memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Kebijakan-kebijakan yang dibuat perusahaan besar akan membawa dampak yang besar pula terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil.

Keadaan perekonomian global dapat memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Dampak tersebut akan dirasakan oleh setiap industri terutama industri keuangan. Perusahaan-perusahaan pada sektor industri keuangan akan cenderung melakukan manajemen laba dalam pelaporan kinerja.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Praktek Corporate Governance, Struktur**

Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perbankan.”

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian Sirat (2012) menemukan bahwa komite independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Adityo (2009) yang menunjukkan komite independen berhubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Menurut penelitian Isenmila dan Elijah (2012) menemukan bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba berpengaruh secara signifikan. Sedangkan penelitian Sirat (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan di atas, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah kepemilikan manajerial perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?

5. Apakah kepemilikan institusional perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?

Ketidakkonsistenan hasil-hasil peneliti terdahulu mengenai pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba menimbulkan keinginan untuk melakukan penelitian kembali.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara penerapan *corporate governance*, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menjelaskan hubungan dan pengaruh dari komisaris independen terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan.
2. Untuk memberikan bukti empiris dan menjelaskan hubungan dan pengaruh dari komite audit terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan.
3. Untuk memberikan bukti empiris dan menjelaskan hubungan dan pengaruh dari kualitas auditor terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan.

4. Untuk memberikan bukti empiris dan menjelaskan hubungan dan pengaruh dari struktur kepemilikan terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan.
5. Untuk memberikan bukti empiris dan menjelaskan hubungan dan pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai pengaruh *corporate governance*, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan tentang praktek manajemen laba (*earning management*).

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penelitian yang berkaitan tentang pengaruh *corporate governance*, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam pelaporan keuangannya.

3. Bagi Penelitian Mendatang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang mengenai peran dan pengaruhnya *corporate governance*, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan independen, hasil analisis data, dan interpretasi terhadap hasil berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

Bab II

Telaah Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang terdapat dalam penelitian ini, adalah teori agensi. Teori ini menjadi teori dasar yang mendasari proses berlangsungnya praktek bisnis perusahaan. Teori agensi berhubungan dengan perilaku para prinsipal (pemilik) dan agen mereka (manajer perusahaan). Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (Jensen, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku memiliki informasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Adanya perbedaan posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan dan latar belakang antara prinsipal dan agen yang saling bertolak belakang dapat menimbulkan *conflict of interest* atau pertentangan tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara yang satu dengan lainnya. Prinsipal dan agen diasumsikan termotivasi oleh kepentingan sendiri. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan asimetri informasi (kesenjangan informasi). Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka

sendiri. Prinsipal hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi dalam perusahaan. Sedangkan agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara pemilik modal dengan manajer perusahaan, dimana antara *agent* dan manajer ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang diinginkan. Masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasinya. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Prinsipal mengukur prestasi agen berdasarkan kemampuan memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen.

Tindakan yang diambil untuk mengatasi atau meminimalisasi konflik keagenan tersebut akan membutuhkan biaya. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya keagenan sebagai berikut:

1. *Monitoring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh *principals* untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku manajer.
2. *Bonding Cost* adalah biaya pengikatan *agent* agar *agent* bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik perusahaan. Para *agent* akan diberi kompensasi yang wajar dan bila mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemilik kompensasi tersebut tidak akan diberikan.

3. *Residual Loss*. Meskipun sudah ada *monitoring* dan *bonding*, kadang kepentingan *shareholders* dan *agents* masih sulit diselaraskan karena itu muncul *agency losses* dari perbedaan kepentingan tersebut dan ini disebut *residual loss*.

Semakin tinggi biaya keagenan maka semakin besar tuntutan terhadap kualitas audit yang lebih tinggi. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self interest*, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen, dalam hal ini adalah auditor independen.

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen membutuhkan adanya kehadiran pihak ketiga yang independen untuk menengahi konflik diantara kedua pihak tersebut (Setiawan, 2006). Berdasarkan pandangan teori keagenan tampak jelas peran auditor dalam memberikan jasa atestasi atas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak agen dan dijadikan dasar pembuatan kontrak. Auditor diharapkan memberikan pandangan yang independen tentang kesahihan angka-angka yang disajikan. Auditor dapat melakukan fungsinya dengan benar jika memiliki kompetensi yang memadai dan sikap independen.

Penerapan corporate governance didasarkan pada teori agensi. *Corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham (Susiana dan herawaty, 2007). Teori agensi mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Namun ada dua kepentingan

yang berbeda dari masing-masing pihak untuk mencapai suatu kemakmuran. Komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris perusahaan, dalam teori agensi komite audit dapat digolongkan sebagai *principal*. Komite audit merupakan salah satu cara yang digunakan *principal* untuk mengontrol *agent* agar bertindak sesuai dengan keinginan *principal*.

Struktur modal atau keputusan pendanaan akan sangat berpengaruh pada kinerja [perusahaan](#). Para manajer dalam menjalankan operasi perusahaan, sering kali tindakannya bukan memaksimalkan shareholder, melainkan justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara external shareholder dengan manajer. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan merupakan konflik keagenan atau *Agency konflik*. Menurut Crutchley *et al.* (1989) peningkatan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan.

2.1.2 Corporate Governance

Banyak perusahaan di Indonesia mengalami kinerja financial dan non financial yang buruk. Hal ini menimbulkan keawatiran akan pengawasan dan tata kelola perusahaan. Ungkapan tata pengelolaan perusahaan yang baik semakin akrab dengan perkembangan bisnis di Indonesia. Pengelolaan perusahaan yang baik dapat dikatakan sebagai suatu system pengelolaan perusahaan secara baik dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan investor dan kepentingan pihak-pihak lain.

Tata cara pengelolaan perusahaan lebih sering disebut *corporate governance*. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor dapat percaya bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, dan yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

Prinsip dasar *corporate governance* dari OECD (2004) didasarkan pada empat standar utama yang mencakup *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*.

1. *Fairness*

Corporate governance harus melindungi hak pemilik saham. *Corporate governance* juga harus memastikan perlakuan yang sesuai terhadap semua shareholder, termasuk shareholder minoritas dan asing. Semua shareholder harus memiliki peluang untuk memperoleh ganti rugi yang sesuai terhadap pelanggaran hak mereka.

2. *Transparency*

Corporate governance harus mampu memastikan kalau pelaporan secara berkala dan akurat dibuat untuk semua hal signifikan yang berhubungan dengan perusahaan termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

3. *Accountability*

Corporate governance harus memberi kepastian dalam panduan strategis perusahaan, pengawasan manajemen secara efektif oleh direksi, dan tanggung jawab dewan pada perusahaan serta pemegang saham.

4. *Responsibility*

Corporate governance harus memahami hak dari *stakeholder* seperti ditetapkan dalam peraturan dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan kesejahteraan, pekerjaan dan daya tahan keuangan perusahaan. Prinsip ini mengakui kalau perusahaan harus diatur oleh perundangan dan regulasi di negara dimana mereka beroperasi.

2.1.2.1 Komisaris Independen

KNKG (2006) mendefinisikan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktek *Corporate Governance*. Dalam usaha peningkatan fungsi pengawasan dewan komisaris, keberadaan komisaris independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena di dalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

Menurut Daniri (2006) dewan komisaris harus mampu memberikan pandangan yang bersifat independen terhadap direksi. komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain.

Peraturan No: I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, mensyaratkan bahwa calon perusahaan tercatat harus memiliki komisaris kndependen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah perusahaan tersebut tercatat. Yang dimaksud dengan komisaris independen adalah sebagaimana dimaksud dalam butir 1c Peraturan Bapepam nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu:

1. Berasal dari luar emiten atau Perusahaan Publik.

2. Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten dan perusahaan publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan serta mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 bulan terakhir.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau Perusahaan Publik.
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham emiten atau Perusahaan Publik.
5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau Perusahaan Publik.
6. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

2.1.2.2 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (2004) mengindikasikan, alasan dibutuhkan komite audit disebabkan beberapa hal, antara lain belum optimalnya peran pengawasan yang diemban dewan komisaris di banyak perusahaan dan adanya karakteristik umum yang melekat pada entitas bisnis di

Indonesia berupa pemusatan kontrol atau pengendalian kepemilikan perusahaan di tangan pihak tertentu atau segelintir pihak saja. Menurut FCGI (2002), pada umumnya Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang perusahaan.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, etika bisnis serta melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab dalam pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi), kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Komite

Audit dibedakan menjadi tiga hal atau karakteristik yaitu komite audit untuk perbankan, BUMN, dan perusahaan publik. Pada kategori perbankan, peraturan tentang komite audit dalam perbankan disebut dengan Dewan Audit, diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB/1995 tanggal 31 Maret 1995.

Pada akhirnya, suatu Dewan Komisaris yang aktif, cangguh, ahli, beragam dan yang terpenting independen yang menjalankan fungsinya secara efektif dan dibantu oleh Komite Audit adalah yang paling baik untuk ditempatkan dalam memastikan implementasi *Good Corporate Governance* berjalan dengan baik sehingga kecurangan (fraud) maupun keterpurukan bisnis dapat dihindari.

2.1.2.3 Kualitas Auditor

Kualitas auditor ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi yang dimiliki auditor (Christiawan, 2002). Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan pada standar yang telah digariskan. Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Kualitas auditor merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Nataline (2007) menyebutkan ada sembilan elemen pengendalian kualitas yang harus diterapkan oleh kantor akuntan, yaitu:

1. Independensi

Seluruh auditor harus independen terhadap klien ketika melaksanakan tugas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah dengan mengkomunikasikan aturan mengenai independensi kepada staf.

2. Penugasan personel untuk melaksanakan perjanjian

Personel harus memiliki pelatihan teknis dan profesionalisme yang dibutuhkan dalam penugasan. Prosedur dan kebijakan yang digunakan yaitu dengan mengangkat personel yang tepat dalam penugasan untuk melaksanakan perjanjian serta memberi kesempatan partner memberikan persetujuan penugasan.

3. Konsultasi

Jika diperlukan personel yang dapat mempunyai asisten dari orang yang mempunyai keahlian, *judgement*, dan otoritas yang tepat. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mengangkat individu sesuai dengan keahliannya.

4. Supervisi

Pekerjaan pada semua tingkat harus disupervisi untuk meyakinkan telah sesuai dengan standar kualitas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah menetapkan prosedur-prosedur untuk *me-review* kertas kerja dan laporan serta menyediakan supervisi pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

5. Pengangkatan

Karyawan baru harus memiliki karakter yang tepat untuk melaksanakan tugas secara lengkap. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah selalu menerapkan suatu program pengangkatan pegawai untuk mendapatkan karyawan pada level yang akan ditempati.

6. Pengembangan profesi

Personel harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab yang disepakati. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menyediakan program peningkatan keahlian spesialisasi serta memberikan informasi kepada personel tentang aturan profesional yang baru.

7. Promosi

Personel harus memenuhi kualifikasi untuk memenuhi tanggung jawab yang akan mereka terima di masa depan. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap tingkat pertanggungjawaban dalam kantor akuntan serta secara periodik membuat evaluasi terhadap personel.

8. Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien

Kantor akuntan publik harus meminimalkan penerimaan penugasan sehubungan dengan klien yang memiliki manajemen dengan integritas yang kurang. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kriteria dalam mengevaluasi klien baru serta *me-review* prosedur dalam kelangsungan kerja sama dengan klien.

9. Inspeksi

Kantor akuntan harus menentukan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan elemen-elemen yang lain yang akan diterapkan secara efektif. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mendefinisikan luas dan isi program inspeksi serta menyediakan laporan hasil inspeksi untuk tingkat yang tepat.

Dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling penting. Selain ukuran KAP, dimensi kualitas auditor yang lain adalah spesialisasi auditor dan independensi auditor. Dalam penelitian ini kualitas auditor diukur menggunakan dimensi ukuran KAP, yaitu KAP yang termasuk dalam *Big Four* dan KAP yang tidak termasuk dalam *Big Four*. Penggunaan KAP big four akan menjadi suatu sinyal kepada publik bahwa laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan memiliki reliabilitas yang tinggi. Jika auditor ini tidak dapat mempertahankan reputasinya maka masyarakat tidak memberi kepercayaan terhadap auditor *Big Four* sehingga auditor ini akan tiada dengan sendirinya (Sanjaya, 2008).

2.1.3 Struktur Kepemilikan

Pembagian kewenangan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah agensi antara pemilik dan manajer. Teori agensi menyatakan bahwa manajer yang bertindak sebagai agen akan cenderung memenuhi kesejahteraannya lebih dahulu dibandingkan dengan kesejahteraan pemilik. Tindakan ini dapat mengurangi kesejahteraan pemilik. Hal inilah yang seringkali memunculkan konflik agensi. Motivasi dan kepentingan yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi (Rachmawati, 2007)

Jensen dan Meckling (1975) menyatakan bahwa agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda. Keselarasan kepentingan tersebut dapat dicapai jika agen (manajer) memiliki saham di perusahaan. Manajer yang memiliki saham, mempunyai kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika hal ini terjadi, maka konflik agensi dapat dikurangi. Bila seseorang memiliki kontrol yang efektif, artinya manajer memiliki saham kepemilikan, maka ia akan dapat mengendalikan informasi akuntansi dan kebijakan pelaporan.

2.1.3.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris). Peasnell dkk. (2000), menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih kecil akan memiliki proporsi *outside* yang lebih besar. Mereka menemukan bahwa *outside director*

berperan penting dalam membatasi manajer untuk merekayasa laba ketika kepemilikan manajerialnya rendah.

Teori agensi juga menyatakan bahwa salah satu pemicu untuk melakukan rekayasa laba adalah level kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Masalah teknis tidak akan timbul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tidak dijalankan secara terpisah. Pemilik (pemegang saham) bertujuan untuk memaksimalkan kekayaannya dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan sedangkan manajer bertujuan pada peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan yang meningkat akan memberikan peluang bagi manajer bawah dan menengah untuk dipromosikan. Selain itu, manajer dapat membuktikan diri sebagai karyawan yang produktif sehingga dapat diperoleh penghargaan lebih dari wewenang untuk menentukan pengeluaran.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antar manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Siregar, 2005).

Pandangan lain menyatakan bahwa pada kepemilikan manajerial yang semakin besar, insentif untuk menggeser kesejahteraan menjadi lebih rendah. Hal ini menyatakan adanya asosiasi negatif antara perekayasaan dan tingkat kepemilikan manajerial (Beattie, dkk., 1994). Dalam konteks rekayasa laba, Dhaliwal, Salamon, dan Smith (1982) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berasosiasi negatif dengan rekayasa laba. Weisbach (1988) menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan manajerial yang lebih tinggi akan menurunkan kemungkinan adanya praktek perekayasaan laba.

2.1.3.2 Kepemilikan Institusional

Selain proporsi kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan perusahaan juga dapat ditunjukkan dengan perspektif lain yakni proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham institusional versus individual. Investor institusional adalah investor besar yang memiliki pengalaman lebih dalam investasi (Lang dan McNichols, 1997; Koh, 2001). Suatu organisasi yang biasanya dikelompokkan sebagai investor institusional adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, lembaga keuangan, perusahaan investasi, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lain yang dapat dikategorikan sebagai institusi.

Kepemilikan institusional umumnya akan bertindak sebagai pihak yang memantau aktivitas perusahaan (Faizal, 2004). Perusahaan dengan kepemilikan yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Investor institusional dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: berorientasi jangka pendek (*transient*) dan berorientasi jangka panjang. Bukti-bukti empiris

juga menjelaskan bahwa tipe investor institusional yang berbeda memiliki efek yang berbeda pula terhadap strategi rekayasa laba.

Carlson dan Bathala (1997) menyatakan bahwa dengan melakukan praktek rekayasa laba, perusahaan dapat memelihara portfolionya untuk menjaga kepentingan investor institusional. Mereka beralasan bahwa investor transien lebih menyukai untuk menjual saham perusahaan yang tidak dapat mencapai laba target. Adanya praktek tersebut, investor transien merasa kepentingannya terpenuhi karena target laba perusahaan tercapai.

Laba yang dapat diprediksi untuk portfolionya akan lebih disukai. Bagi manajer perusahaan, hal ini merupakan dorongan untuk memelihara trend laba yang dapat diprediksi yang mempengaruhi juga nilai pasar perusahaan (Barth dkk., 1999; Loomis, 1999; dan Fox, 1997). Rekayasa laba juga memberikan kesempatan bagi manajer untuk membangun ketimpangan akuntansi untuk periode mendatang (DeFond dan Park, 1997).

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan (Kartini dan Arianto, 2008). Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan yang ditentukan dengan batas-batas tertentu yang sudah ditentukan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain total aset, nilai pasar, dan penjualan perusahaan. Pengukuran dengan menggunakan total aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai pasar dan penjualan.

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan yang berukuran besar lebih dikenal oleh masyarakat dan melibatkan lebih banyak pihak dalam kegiatan operasi perusahaan. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007) dalam (Ningsaptiti, 2010).

Selain itu, perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Daniati dan Suhairi, 2006).

Dalam penelitian ini juga digunakan *leverage* sebagai variabel kontrol. Menurut Syahyunun (2004), *leverage* dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban-kewajiban keuangan yang sifatnya tetap.

2.1.5 Manajemen Laba

Standar akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk memilih beberapa metode alternatif untuk memperlakukan transaksi yang sama, manajemen dapat mengubah jumlah angka yang berkaitan dengan pendapatan

maupun beban. Hal ini memberikan manajemen keuntungan dalam menghitung laba perusahaan dan pengukuran keuangan lainnya.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen laba, Sutrisno (2002) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan membentuk transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada *stakeholders* tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Healy dan Wahlen (1998) dalam Handayani dan Rachadi (2009) menyebutkan bahwa manajemen laba adalah proses dimana manajer menggunakan kemampuan deskresi yang dimiliki untuk menyesatkan *stakeholders* atau mempengaruhi hasil kontraktual dengan owner. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk mengolah laba melalui pertimbangan manajer sehingga mengakibatkan perubahan informasi yang ada di laporan keuangan, tindakan ini bertujuan untuk menyesuaikan laporan keuangan perusahaan sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan.

Manajemen laba memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Dengan adanya manipulasi terhadap laba maka pemakai laporan keuangan akan mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Praktek manajemen laba mengakibatkan laporan keuangan kehilangan kepercayaan pemakai laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya manajemen laba yang dilakukan manajemen perusahaan.

Penelitian Sirat (2012) menganalisis tentang pengaruh praktek *corporate governance*, kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap jumlah *earning management*. Ditemukan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah *earning management*. Semakin besar perusahaan, semakin kecil *earning management* pada *earnings* rata-rata dan *earning management* di perusahaan yang nilai rata-ratanya lebih tinggi daripada kepemilikan keluarga. Perusahaan yang bukan konglomerat justru lebih tinggi *earning managementnya*. Praktek penerapan *corporate governance* dan kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *earning management*.

Penelitian Isenmila dan Elijah (2012) menguji hubungan antara struktur kepemilikan dan manajemen laba di Nigeria. Struktur kepemilikan dibedakan menjadi kepemilikan insider, kepemilikan institusional dan kepemilikan eksternal. Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kepemilikan Eksternal dan Manajemen Laba. Hubungan antara *Insider Ownership* dan Manajemen Laba juga diamati positif dan signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Hubungan positif juga diamati antara Kepemilikan Investor Institusional dan Manajemen Laba. Namun, hubungan secara statistik tidak signifikan pada tingkat 5%.

Sitha (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen dan reputasi auditor dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Adityo (2009) meneliti tentang pengaruh mekanisme tata kelola dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian Sanjaya (2008) meneliti tentang apakah manajemen laba yang berbeda antara perusahaan yang telah diaudit dan non-audit (*big four* dan *non big four*). Penelitian ini meneliti apakah manajemen laba bagi perusahaan membentuk komite audit yang memenuhi syarat dan menggunakan auditor dari KAP *Big Four* lebih rendah dari tiga kelompok perusahaan lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba agak rendah selama diaudit auditor *big four* daripada *non big four* auditor. Tapi tingkat manajemen laba berbeda jauh bagi perusahaan yang membentuk maupun tidak membentuk komite audit, dan menggunakan kombinasi antara komite audit dan auditor.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Sanjaya, I Putu Sugiarta (2008)	Auditor eksternal, komite audit, dan manajemen laba.	Dependen: Manajemen laba Independen: Auditor eksternal, komite audit	Independent sample t test dan regresi.	Absolut akruar diskresioner sebagai proksi manajemen laba lebih rendah bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan <i>big four</i> dibanding <i>non big four</i> . Ada perbedaan manajemen laba antara komite audit yang memenuhi syarat dengan komite audit yang tidak memenuhi syarat atau tidak membentuk komite audit. Kelompok perusahaan yang komite audit-nya memenuhi syarat dan diaudit oleh

					auditor (berafiliasi big four) memiliki manajemen laba paling rendah dibanding tiga kelompok perusahaan lain.
2.	Adityo, Stefanus Ferdian (2009)	Pengaruh mekanisme tata kelola dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur.	Dependen: Manajemen laba Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan	Multiple regression analysis	Kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba.

3.	Sitha, I Gusti Ayu Putu (2011)	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Manajemen Laba	Dependen: Manajemen laba Independen: Ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, reputasi auditor, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan	Multiple regression analysis	Komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen dan reputasi auditor dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba.
4.	Sirat, Hadi (2012)	Corporate governance practices, share ownership structure, and size on earning management (manufacturing companies)	Dependen: Earning management Independen: Quality of audit, the proportion of independent board, existence of audit committee, family ownership, institutional ownership, firm size	Multiple regression	Ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah <i>earning management</i> , pratik penerapan <i>corporate governance</i> dan kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh

					secara signifikan terhadap <i>earning management</i> .
5.	Isenmila dan Elijah (2012)	Earning management and ownership structure: Evidence from Nigeria	Dependen: Earning management Independen: Insider ownership, institutional ownership, external block ownership	Multivariate regression	Hubungan yang positif dan signifikan antara kepemilikan Eksternal dan Manajemen Laba. Hubungan antara <i>Insider Ownership</i> dan Manajemen Laba juga diamati positif dan signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Hubungan positif juga diamati antara Kepemilikan Investor Institusional dan Manajemen Laba. Namun, hubungan secara statistik tidak signifikan pada tingkat 5%.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, di dalam penelitian ini menggunakan modifikasi penelitian Sirat (2012) dengan perbedaan

ruang lingkup penelitian yaitu pada industri perbankan di Indonesia dan periode pengambilan sampel yang berbeda serta perbedaan variabel yang lainnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini ingin mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, kualitas auditor dan variabel lain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Manajemen Laba (Earning Management) sebagai variabel dependen serta penggunaan variabel kontrol yaitu *leverage*.

Peran komisaris independen sebagai penyeimbang antara manajer dengan pemegang saham memberikan manfaat untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya komisaris independen ini diharapkan akan mengurangi konflik keagenan sehingga dapat mengurangi manajemen laba pada perusahaan.

Komite audit berfungsi untuk menambah sistem pengendalian internal perusahaan menjadi lebih baik. Oleh karena itu dengan adanya komite audit diharapkan dapat mengurangi manajemen laba.

Auditor yang berkualitas mampu menangkap adanya kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan karena mempunyai pengalaman dan sumber daya yang lebih baik. Maka dengan mendapatkan kualitas auditor yang baik, manajemen laba dapat berkurang.

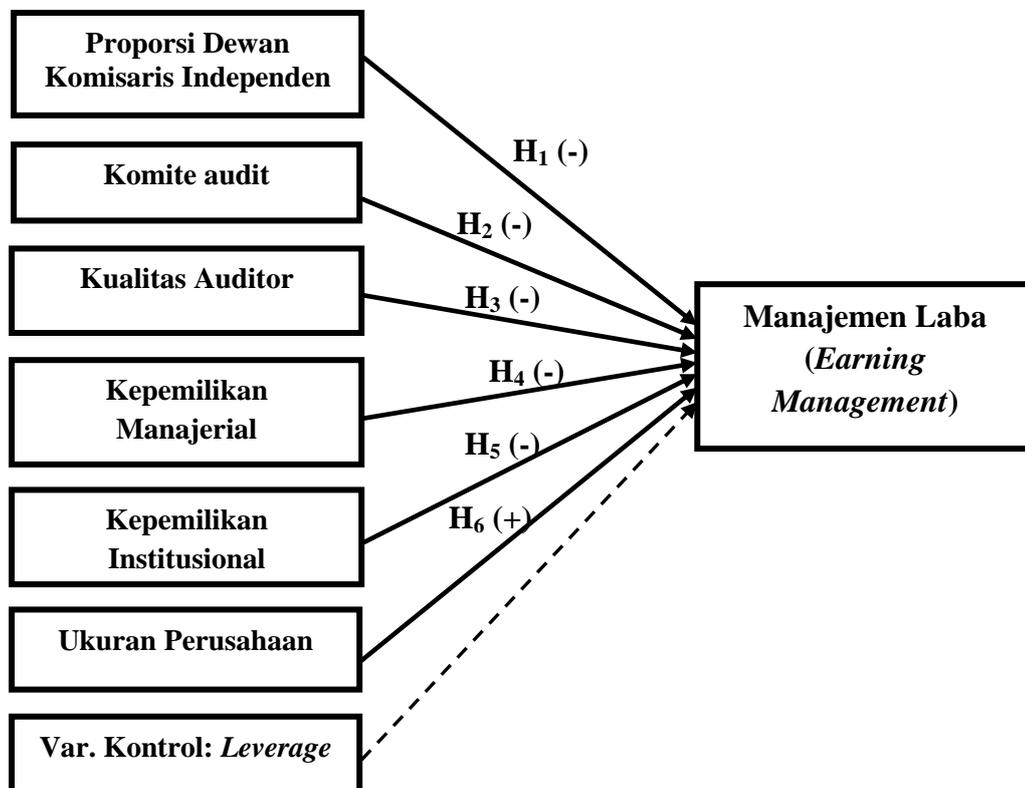
Kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan

memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dengan meningkatkan persentase kepemilikan manajerial diperkirakan dapat mengurangi manajemen laba.

Investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan dengan investor individual. Investor institusional tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan manajemen, sehingga dapat mengurangi manajemen laba.

Semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula kesempatan manajer untuk melakukan manajemen laba. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena perusahaan dituntut untuk mewujudkan ekspektasi investor yang tinggi. Berikut ini adalah kerangka konseptual berdasarkan model penelitian ini yang dapat digambarkan dalam bentuk kerangka skematik sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Manajemen Laba

Berdasarkan teori agensi, konflik kepentingan yang timbul antara prinsipal dan agen dapat ditengahi dengan dihadirkannya pihak independen (Setiawan, 2006). *Non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dengan kata lain komisaris independen mempunyai fungsi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap stakeholder. Keberadaan komisaris independen juga berfungsi sebagai pengurang kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komisaris independen dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga diperoleh laporan yang berkualitas yang dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.4.2 Komite Audit dan Manajemen Laba

Dalam teori agensi terdapat biaya yang digunakan untuk mencegah konflik kepentingan, diantaranya *monitoring cost*. Komite audit merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan *principal* terhadap *agent*. Peran komite audit untuk mengurangi tindakan oportunistik manajemen semakin penting, setiap

perusahaan *go public* telah diwajibkan untuk memiliki komite audit. Komite audit memiliki fungsi sebagai pengawas, baik itu pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan kontrol terhadap *corporate governance*.

Keefektifan komite audit dalam mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan dan internal auditor akan sangat berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba, apabila komite audit secara terus menerus melakukan pemeriksaan maka pihak manajemen tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.4.3 Kualitas Auditor dan Manajemen Laba

Kepastian mengenai relevansi dan keandalan dari laporan keuangan perusahaan sangat diperlukan untuk membantu pihak eksternal dalam mengambil suatu keputusan bisnis (Mayangsari, 2003). Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian mengenai integritas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Menurut pandangan teori agensi, jasa attestasi atas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak agen dapat diberikan melalui peran auditor.

Menggunakan jasa auditor yang berkualitas dan profesional merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya. Auditor yang berkualitas

memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi sehingga auditor yang berkualitas akan mengaudit perusahaan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Kualitas auditor dalam penelitian ini diukur dengan proksi ukuran KAP. Auditor yang bekerja di KAP *Big Four* dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *non Big Four* (Isnanta, 2008). Dengan auditor yang berkualitas diharapkan tidak akan terjadi *audit failur* dan akan mengurangi tindakan manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.4.4 Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba

Peningkatan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan. Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan meningkatnya persentase kepemilikan, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

Pada kepemilikan yang menyebar, masalah keagenan terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Sebagai konsekuensinya, manajer menuntut kompensasi yang tinggi sehingga meningkatkan biaya keagenan. Pada kondisi ini, konflik keagenan diatasi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan

keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mengurangi tindakan manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

2.4.5 Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Sesuai teori agensi, pihak investor institusi sebagai prinsipal dapat memonitor agen. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri. Investor institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi pengelolaan laba yang bersifat *opportunistic* yang dilakukan perusahaan, maka kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengurangi manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.4.6 Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aset perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar merupakan perusahaan yang memiliki tingkat penjualan lebih besar, tingkat kestabilan perusahaan lebih tinggi dan melibatkan lebih banyak pihak. Karena pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan besar berpengaruh terhadap publik, sehingga masyarakat lebih mengenal perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan manajemen laba.

Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena memiliki biaya politik lebih besar. Hal ini didasarkan dari hipotesis biaya proses politik. Dalam *ceteris paribus* semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laporan *earning* periode sekarang ke periode mendatang (Watts dan Zimmerman, 1990). Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Perusahaan besar memiliki motivasi untuk melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba guna menurunkan biaya politik (Sulistyanto, 2008).

Manajer memiliki insentif dalam pemilihan metode akuntansi dan penggunaan diskresi untuk menurunkan laba dan risiko politik. Proses politik

menimbulkan biaya bagi perusahaan atau industri yang diyakini memperoleh keuntungan dari publik atau memperoleh laba sangat tinggi. Laba sangat tinggi mengakibatkan perusahaan ditekan agar menurunkan harga jual atau pemerintah meregulasi harga. Suatu studi melaporkan bahwa manajer bank mengelola penyisihan kerugian piutang (Collins et al. 1995)

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi manajemen laba dimana semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kesempatan untuk melakukan manajemen laba guna memenuhi tuntutan ekspektasi investor yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H6: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba

Bab III

Metode Penelitian

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*). Variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur dengan akrual diskresioner (*discretionary accruals*). Sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang diduga mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas auditor, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan (*firm size*).

3.1.2 Definisi Operasional

3.1.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Penyajian laba merupakan hal yang sering dimanipulasi oleh pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang terlihat menguntungkan. Usaha ini disebut dengan manajemen laba. Pengukuran manajemen laba dilakukan dengan cara menghitung *discretionary accrual*. Pengukuran *discretionary accrual* sebagai proksi kualitas laba

(manajemen laba) menggunakan model khusus Beaver dan Engel (1996).

Model tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

CO_{it} : *loan charge offs* (pinjaman yang dihapus bukukan)

$LOAN_{it}$: *loans outstanding* (pinjaman yang beredar)

NPA_{it} : *non performing assets* (aktiva produktif yang bermasalah), terdiri dari aktiva produktif yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya digolongkan menjadi (a) kurang lancar, (b) diragukan, dan (c) macet.

ΔNPA_{it+1} : selisih *non performing assets* t+1 dengan *non performing assets* t

NDA_{it} : akrual non kelolaan

Sesuai dengan definisinya bahwa:

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it}$$

Dimana:

DA_{it} adalah akrual kelolaan (manajemen laba), TA_{it} adalah total akrual, dan

NDA_{it} adalah akrual non kelolaan, maka:

$$TA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1} + z_{it}$$

Dimana $z_{it} = DA_{it} + \varepsilon_{it}$

Untuk menentukan akrual total dengan menggunakan model Beaver dan Engel (1996) ini maka digunakan total saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Dalam penentuan koefisien manajemen laba tersebut semua

variabel dibagi terlebih dahulu dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman.

3.1.2.2 Variabel Independen

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Dalam penelitian ini Proporsi Komisaris Independen diukur dengan rasio atau prosentase (%) antara jumlah anggota Komisaris Independen dibandingkan dengan total anggota Dewan Komisaris di perusahaan.

2. Komite Audit

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE- 008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 serta Pedoman Pembentukan Komite Audit menurut BAPEPAM perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan.

3. Kualitas Auditor

Kualitas auditor dalam penelitian ini merupakan tingkat profesionalisme auditor yang digunakan. Kualitas auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*, nilai 1 diberikan untuk auditor yang berkualitas tinggi (*Big Four*) dan nilai 0 diberikan untuk auditor yang berkualitas rendah (*Non Big Four*). KAP di Indonesia yang saat ini berafiliasi dengan KAP *Big Four* antara lain:

1. PricewaterhouseCoopers (KAP Tanudireja Wibisana & Rekan).
 2. Ernst & Young (KAP Purwantono Sarwoko & Sandjaja).
 3. Deloitte Touche Tohmatsu (KAP Osman Bing Satrio & Rekan).
 4. KPMG (KAP Siddhartha & Widjaja).
4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner *et al*, 2003). Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan yang ditentukan dengan batas-batas tertentu yang sudah ditentukan. Proksi *Firm size* (ukuran perusahaan) dalam penelitian ini adalah logaritma natural dari besarnya total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun.

3.1.2.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang digunakan untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya menjadi lebih baik sehingga mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol bukan merupakan variabel utama yang akan diteliti dan diuji tetapi lebih ke variabel lain yang mempunyai efek pengaruh terhadap variabel independen (Susanti dkk. 2010). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah dan *leverage*. Variabel *leverage* menggunakan rasio *Debt to Asset*, yaitu perbandingan total liabilitas dengan total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2010, pada penelitian ini menggunakan perubahan aset produktif yang bermasalah (*non performing asset*) selama lebih dari 1 tahun sebagai proksi manajemen laba. Sampel adalah bagian dari populasi yang dinilai dapat mewakili karakteristiknya. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sesuai

dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan selama periode 2009-2010.
2. Selama periode 2009-2010 perusahaan menerbitkan *annual report* secara lengkap.
3. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 Desember 2009 dan 2010), termasuk data mengenai dewan komisaris independen, komite audit, auditor eksternal (KAP), kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan (*annual report*) periode 2009-2010. Data tersebut diperoleh dengan mengakses Pojok BEI Universitas Diponegoro.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mengolah literatur, jurnal, artikel, dan atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi jumlah sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Ghozali, 2006). Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. *Mean* digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik disyaratkan untuk model regresi berganda. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dengan data metrik yang diprediksi beberapa variabel independen dengan data metrik dan/atau data non-metrik, sehingga model regresi berganda sesuai untuk digunakan pada penelitian ini. Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini didasarkan pada uji statistik sederhana dengan melihat nilai kurtosis dan *skewness* untuk semua variabel dependen dan independen. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak adalah dengan melihat grafik *normal P plot of regression statistics*. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik pada sumbu diagonal dari grafik). Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

Untuk menghindari adanya hasil yang menyesatkan menggunakan grafik, maka uji grafik ini dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : data residual berdistribusi normal

H_A : data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan pada *one sample kolmogorov-smirnov* adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi data residual. Jika angka probabilitas $< \alpha = 0,05$ maka variabel tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas $> \alpha = 0,05$ maka H_A ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006).

3.5.2.2 Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolonieritas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolonieritas yaitu :

- a. Nilai R square (R^2) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak terikat.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0,09), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- c. Melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2006).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui terjadinya varian tidak sama untuk variabel bebas yang berbeda (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas).

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* dengan ketentuan:

- a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain menggunakan grafik *scatterplots*, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Jika probabilitas signifikan > 0.05 , maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi tersebut terjadi autokorelasi atau tidak, diperlukan uji autokorelasi yang bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dapat dikatakan terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2006). Autokorelasi muncul karena penelitian yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk menguji autokorelasi antara lain dapat dilakukan dengan melakukan Uji *Durbin Watson*, Uji *Langrange Multiplier*, Uji *Statistics Q: Box Pierce* dan *Ljung Box*, dan *Run Test* (Ghozali, 2006). Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Run Test*.

3.5.3 Uji Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda digunakan untuk

menguji pengaruh variabel independent (data metrik dan/atau data non-metrik) terhadap variabel dependen (data metrik). Analisis regresi berganda menggunakan taraf signifikansi pada level 5% ($\alpha=0,05$). Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$DACC_t = \beta_0 + \beta_1 INKOM_t + \beta_2 KA_t + \beta_3 AUD_t + \beta_4 KPM_t + \beta_5 KPI_t + \beta_6 SIZE_t + \beta_7 LEV_t + \varepsilon$$

Keterangan:

DA_t = Nilai absolut akrual diskresioner pada tahun t

$INKOM_t$ = Proporsi dewan komisaris independen pada tahun t

KA_t = Jumlah anggota komite audit

AUD_t = kualitas auditor, nilai 1 jika KAP Big 4 dan 0 jika KAP Non Big 4

KPM_t = Kepemilikan manajerial pada tahun t

KPI_t = Kepemilikan institusional pada tahun t

$SIZE_t$ = Logaritma natural total aset

LEV_t = *Leverage* perusahaan pada tahun t

ε = *Error*

Analisis terhadap hasil regresi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji signifikansi simultan (uji statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama dengan variabel terikat (Ghozali, 2006)

2. Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2006).

3. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Hipotesis diterima apabila memiliki taraf signifikansi dibawah 5% atau $\alpha < 0,05$. (Ghozali, 2006).

Bab IV

Hasil dan Analisis

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) selama periode 2009 dan 2010. Berdasarkan data yang didapat dari IDX (*Indonesia Stock Exchange*), terdapat 31 perusahaan perbankan yang *listed* di BEI selama periode 2009 dan 2010. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Maka diperoleh sampel penelitian yang diperinci sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah populasi perusahaan perbankan yang <i>listed</i> di BEI periode 2009 dan 2010.	31
2	Jumlah perusahaan dengan data tidak valid/tidak lengkap sehingga tidak sesuai dengan kriteria ke-3.	(5)
	Jumlah perusahaan yang menjadi sampel	26

Sumber: data yang telah diolah

Berdasarkan 31 perusahaan perbankan yang terdaftar dalam BEI periode 2009 dan 2010, tetapi terdapat 5 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria ke-3 yaitu tidak tersedia data tentang komisaris independen dan komite audit. Sehingga ditetapkan sebanyak 26 perusahaan perbankan sebagai sampel yang terdiri dari 52

laporan tahunan perusahaan dalam jangka waktu 2 tahun sebagai data sampel observasi penelitian.

4.2 Analisis data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran tentang suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INKOM	52	33.33	80.00	55.9863	8.78595
KA	52	2.00	7.00	3.8846	1.09641
KPM	52	.00	21.70	1.1827	4.33432
KPI	52	15.98	100.00	76.4244	19.45318
SIZE	52	28.06	33.74	31.0053	1.59340
LEV	52	.80	.94	.8948	.03316
DACC	52	18817029218	2.E13	2.22E12	3.836E12
Valid N (listwise)	52				

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Dari hasil analisis statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa jumlah observasi dalam penelitian (N) adalah 52. Nilai terendah pada variabel manajemen laba (DACC) adalah sebesar Rp 18.817.029.218 dimiliki oleh bank Swadesi dan nilai tertinggi sebesar Rp 16.536.923.399.000 dimiliki oleh bank BRI.

Pada tabel 4.2 variabel proporsi dewan komisaris independen menunjukkan nilai minimum 33,3, nilai maksimum 80, nilai rata-rata 55,98, dan standar deviasi 8,79. Berarti dari sampel perusahaan perbankan, komisaris independen yang paling rendah memiliki proporsi 33,3% yaitu pada bank Mutiara dan yang paling tinggi memiliki proporsi 80% yaitu pada bank ICB Bumiputera.

Pada tabel 4.2 variabel komite audit menunjukkan nilai minimum 2, nilai maksimum 7, nilai rata-rata 3,88, dan standar deviasi 1,096. Berarti dari sampel perusahaan perbankan paling sedikit memiliki 2 anggota komite audit yaitu pada bank Bumi Arta dan bank Mega dan paling banyak memiliki 7 anggota komite audit yaitu pada bank CIMB Niaga.

Pada variabel kualitas auditor memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1. Dalam variabel ini nilai 0 diartikan bahwa perusahaan perbankan tidak menggunakan jasa KAP *Big Four*, sedangkan nilai 1 berarti bank tersebut menggunakan KAP *Big Four* dalam mengaudit laporan keuangannya. Berikut hasil pengolahan statistik deskriptif frekuensi dari sampel penelitian:

Tabel 4.3
Hasil Statistik Deskriptif Frekuensi

AUD				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	14	26.9	26.9	26.9
1	38	73.1	73.1	100.0
Total	52	100.0	100.0	

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 38 data perusahaan atau 73,1% dari 52 data perusahaan sampel menunjukkan telah menggunakan jasa auditor dengan kualitas dan reputasi yang baik (KAP *Big Four*). Sedangkan 14 data perusahaan (26,9%) menunjukkan tidak menggunakan jasa KAP *Big Four* (*non Big Four*).

Pada tabel 4.2 variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai minimum 0, nilai maksimum 21,7, nilai rata-rata 1,18, dan standar deviasi 4,33. Berarti dari sampel perusahaan perbankan, persentase kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemennya yang paling rendah sebesar 0% dan yang paling tinggi sebesar 21,7% yaitu dimiliki oleh bank Capital Indonesia.

Pada tabel 4.2 variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum 15,98, nilai maksimum 100, nilai rata-rata 76,42, dan standar deviasi 19,45. Berarti dari sampel perusahaan perbankan, persentase kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi yang paling rendah sebesar 15,98% yaitu pada bank BNI dan yang paling tinggi sebesar 100% yaitu pada bank Mutiara.

Pada tabel 4.2 variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum 28,06, nilai maksimum 33,74, nilai rata-rata 31, dan standar deviasi 1,59. Dapat diartikan bahwa pada perusahaan sampel, bank yang memiliki total aset paling rendah ditunjukkan pada nilai 28,06 yaitu pada bank Swadesi. Sedangkan bank yang memiliki total aset paling tinggi ditunjukkan pada nilai 33,74 yaitu pada bank Mandiri.

Pada tabel 4.2 variabel kontrol yaitu *leverage* memiliki nilai minimum 0,80, nilai maksimum 0,94, nilai rata-rata 0,89, dan standar deviasi 0,033. Nilai

minimum dan maksimum pada variabel ini menyatakan bahwa total *leverage* yang terjadi paling rendah adalah 80% dan tertinggi 94%. Sedangkan secara rata-rata sebesar 89%.

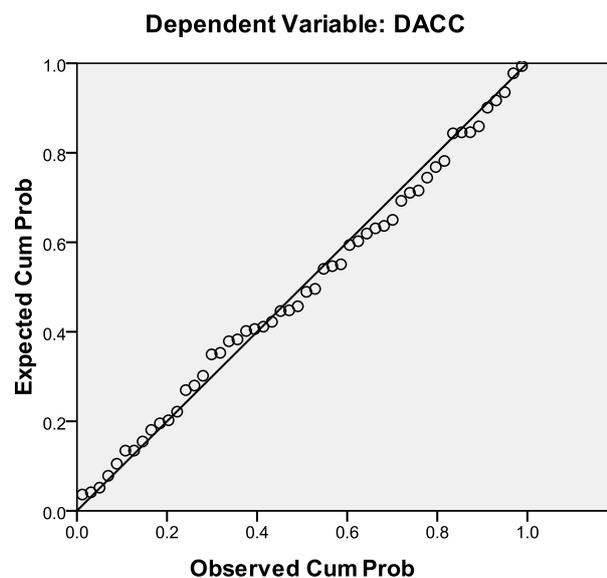
4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dideteksi dengan *normal probability plot* dan analisis statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Akibat data yang tidak terdistribusi dengan normal, maka dilakukan transformasi terhadap data ke dalam bentuk logaritma natural (Ghozali, 2005), sehingga menjadi terdistribusi dengan normal. Hasil analisis menggunakan SPSS ditampilkan di bawah ini:

Gambar 4.1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Tabel 4.4
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.37511492
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		.365
Asymp. Sig. (2-tailed)		.999

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* terlihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal dan model regresi yang diuji dengan menggunakan grafik tersebut telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (KS) menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,365 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena $p=0,999 > 0,05$) yang menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dengan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Suatu model

regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2006).

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
INKOM	.857	1.167
KA	.640	1.563
AUD	.461	2.169
KPM	.905	1.105
KPI	.693	1.443
SIZE	.315	3.172
LEV	.648	1.542

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

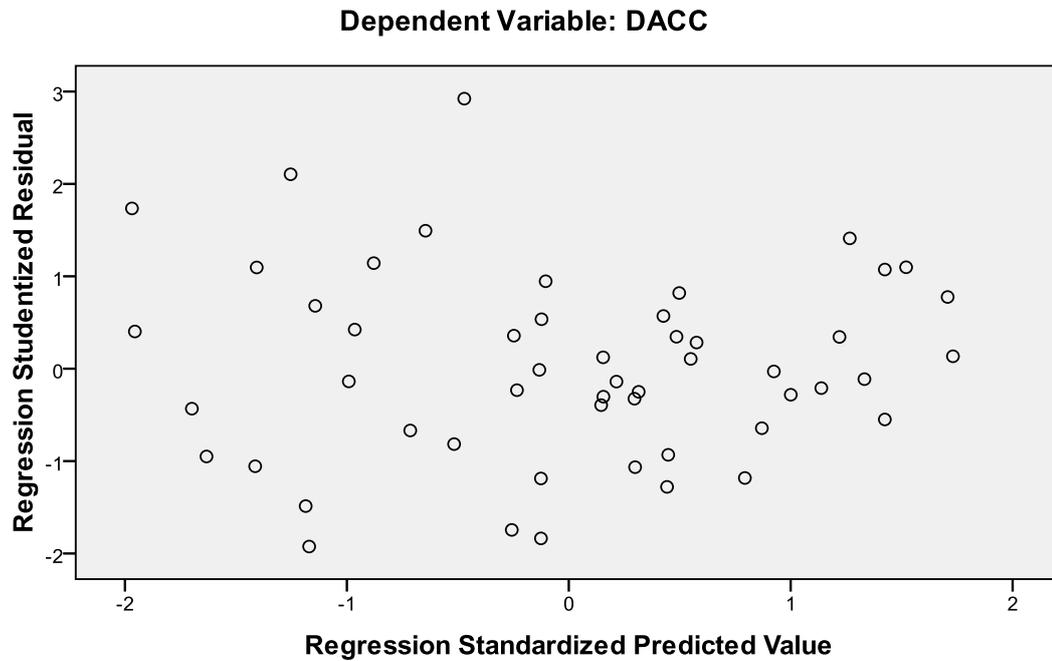
Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa INKOM, KA, AUD, KPM, KPI, SIZE, dan LEV menunjukkan nilai *tolerance* > 0,1 atau nilai VIF < 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini terbebas dari multikolonieritas atau tidak ada korelasi antar variabel bebas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas).

Gambar 4.2

Scatterplot



Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Dari hasil pengujian *scatter plot* pada gambar 4.3 yang merupakan salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 sampai di atas 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak terkena heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan antara yang satu

dengan lainnya. Dimana masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Tabel 4.6
Hasil Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.02724
Cases < Test Value	26
Cases >= Test Value	26
Total Cases	52
Number of Runs	32
Z	1.401
Asymp. Sig. (2-tailed)	.161

a. Median

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai *asymtotic significant* uji *Run Test* sebesar 0,161 ($>0,05$), sehingga residual bebas dari korelasi. Oleh karena itu tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Uji Statistik F (*F Test*)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	166.802	7	23.829	146.102	.000 ^a
	Residual	7.176	44	.163		
	Total	173.978	51			

a. Predictors: (Constant), LEV, KA, INKOM, KPM, KPI, AUD, SIZE

b. Dependent Variable: DACC

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari hasil uji F, nilai F sebesar 146,102 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel INKOM, KA, AUD, KPM, KPI, SIZE, dan LEV secara bersama-sama berpengaruh terhadap DACC.

4.2.3.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness of-fit* dari model regresi, yaitu seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.979 ^a	.959	.952	.40385

a. Predictors: (Constant), LEV, KA, INKOM, KPM, KPI, AUD, SIZE

b. Dependent Variable: DACC

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai dari *adjusted* R² sebesar 0,952 yang berarti sebesar 95,2% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh

variasi dari variabel bebas dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 95,2% manajemen laba yang diprosikan dengan nilai *discretionary accrual* dipengaruhi oleh variabel proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas auditor, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Sedangkan sisanya sebesar 4,8% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.2.3.3 Uji Parsial (*T Test*)

Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Hasil uji t ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.858	3.097		-1.892	.065
INKOM	-.882	.372	-.078	-2.371	.022
KA	.095	.064	.056	1.474	.148
AUD	-.424	.186	-.103	-2.281	.027
KPM	-.044	.075	-.019	-.586	.561
KPI	.095	.207	.017	.458	.649
SIZE	1.157	.063	.998	18.307	.000
LEV	.128	2.118	.002	.060	.952

a. Dependent Variable: DACC

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.8 variabel proporsi dewan komisaris independen memberikan nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar -0,882 dan nilai T sebesar -2,371 menunjukkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktek manajemen laba. Nilai sig sebesar $0,022 < 0,05$ maka variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, “H1: proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba” diterima.

Variabel komite audit memberikan nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar 0,095 dan nilai T sebesar 1,474 menunjukkan komite audit berhubungan positif terhadap praktek manajemen laba. Nilai sig sebesar $0,148 > 0,05$ maka variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, “H2: komite audit berhubungan negatif terhadap manajemen laba” ditolak.

Variabel kualitas auditor memberikan nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar -0,424 dan nilai T sebesar -2,281 menunjukkan kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap praktek manajemen laba. Nilai sig sebesar $0,027 < 0,05$ maka variabel kualitas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, “H3: kualitas auditor berhubungan negatif terhadap manajemen laba” diterima.

Variabel kepemilikan manajerial memberikan nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar -0,044 dan nilai T sebesar -0,586 menunjukkan kepemilikan manajerial berhubungan negatif terhadap praktek manajemen laba. Nilai sig sebesar $0,561 > 0,05$ maka variabel kepemilikan manajerial tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, “H4: kepemilikan manajerial berhubungan negatif terhadap manajemen laba” ditolak.

Variabel kepemilikan institusional memberikan nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar 0,095 dan nilai T sebesar 0,458 menunjukkan kepemilikan institusional berhubungan positif terhadap praktek manajemen laba. Nilai sig sebesar $0,649 > 0,05$ maka variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, “H5: kepemilikan institusional berhubungan negatif terhadap manajemen laba” ditolak.

Variabel ukuran perusahaan memberikan nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar 1,157 dan nilai T sebesar 18,307 menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba. Nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ maka variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, “H6: ukuran perusahaan berhubungan positif terhadap manajemen laba” diterima.

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	T	Sig	Keputusan
H1: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba	-2.371	.022	H1 Diterima
H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba	1.474	.148	H2 Ditolak
H3: Kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba	-2.281	.027	H3 Diterima
H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba	-.586	.561	H4 Ditolak
H5: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba	.458	.649	H5 Ditolak
H6: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba	18.307	.000	H6 Diterima

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Dari hasil penelitian dengan nilai T sebesar -2,371 dan nilai sig sebesar $0,022 < 0,05$ diketahui variabel proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan pada praktek manajemen laba di perusahaan perbankan, berarti semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi manajemen laba yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata perusahaan perbankan telah memiliki proporsi komisaris independen lebih dari 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. Ini terlihat dari nilai rata-rata (*mean*) hasil statistik deskriptif pada variabel ini sebesar 55,9.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan pelaporan keuangan yang dilakukan dewan komisaris akan lebih efektif sehingga dapat mencegah dan menurunkan praktek manajemen laba. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, komisaris independen dapat mengawasi kebijakan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan manajemen laba.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Adityo (2009) dan Peasnell dkk. (2000), yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan.

4.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Dari hasil penelitian ini dengan nilai T sebesar 1,474 dan nilai sig sebesar $0,148 > 0,05$ diketahui variabel komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan perbankan. Komite audit hanya memberikan dampak atau pengaruh yang kecil pada manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata perusahaan perbankan telah memiliki jumlah komite audit yang cukup banyak yaitu lebih dari 3 anggota. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai rata-rata (*mean*) hasil statistik deskriptif pada variabel ini sebesar 3,88.

Jumlah komite audit yang besar belum mampu memperketat sistem pengendalian dan pengawasan komite audit pada manajemen. Kesulitan dalam melakukan koordinasi dan masalah komunikasi yang kurang efektif menjadi penyebabnya jika jumlah komite audit terlalu besar. Sehingga peran komite audit kurang optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pada manajemen perusahaan. Akibatnya akan muncul kesempatan untuk melakukan praktek manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sitha (2011) yang menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

4.3.3 Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Manajemen Laba

Dari hasil penelitian ini dengan nilai T sebesar -2,281 dan nilai sig sebesar $0,027 < 0,05$ diketahui variabel kualitas auditor berpengaruh negatif secara signifikan terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan perbankan. Variabel ini yang diwakili oleh KAP *Big Four* dapat mengurangi manajemen laba secara

lebih efektif daripada KAP *non Big Four*. Hasil statistik deskriptif menunjukkan sebanyak 73% dari perusahaan-perusahaan perbankan sampel lebih memilih menggunakan jasa KAP *Big Four*.

Perusahaan cenderung memilih menggunakan jasa auditor dengan reputasi baik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangannya agar para *stakeholder* meyakini kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Kualitas auditor dan independensinya dapat memberikan dampak terhadap pendeteksian praktek manajemen laba dan mampu mengurangi tindakan manajemen laba.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sanjaya (2008) yang menyatakan bahwa kualitas auditor yang baik dapat mengurangi tindakan manajemen laba.

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Dari hasil pengujian dengan nilai T sebesar -0,586 dan nilai sig sebesar $0,561 > 0,05$ diketahui variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan manajemen laba. Arah negatif menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial pada perusahaan maka semakin kecil manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut disebabkan tingkat persentase kepemilikan manajerial perusahaan-perusahaan perbankan masih rendah. Ini dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) hasil statistik deskriptif variabel ini hanya sebesar 1,18. Adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer maka tindakan manajer akan selaras dengan pemegang saham sehingga dapat memperkecil perilaku oportunistik oleh manajer. Dengan

kepemilikan saham yang tinggi maka kemungkinan terjadinya tindakan oportunistik manajer akan menurun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Adityo (2009), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

4.3.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan nilai T sebesar 0,458 dan nilai sig sebesar $0,649 > 0,05$ diketahui variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktek manajemen laba. Arah positif menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan maka semakin besar pula kesempatan melakukan manajemen laba.

Tingkat persentase kepemilikan institusional perusahaan-perusahaan perbankan sudah cukup tinggi. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) variabel ini mencapai 76,42. Institusi yang memiliki saham cukup besar mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap perusahaan dan proses pelaporan keuangannya. Akibatnya manajer akan merasa terikat untuk memenuhi target laba dan keinginan-keinginan tertentu dari pihak investor, sehingga mereka akan tetap cenderung terlibat dalam tindakan manipulasi laba.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isenmila dan Elijah (2012), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

4.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan nilai T sebesar 18,307 dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap praktek manajemen pada perusahaan perbankan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diwakili oleh total aset perusahaan. Arah positif menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kesempatan melakukan manajemen laba pada perusahaan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) variabel ini sebesar 31 dari kisaran 28 dan 33, ini berarti rata-rata perusahaan perbankan sampel tergolong perusahaan yang berukuran besar karena memiliki total aset yang besar (dihitung menggunakan logaritma natural).

Perusahaan yang berukuran besar akan menanggung biaya politik yang besar sehingga perusahaan mempunyai motivasi untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan perataan laba guna menurunkan biaya politiknya (Sulistyanto, 2008). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sitha (2011) yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Bab V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan suatu model untuk mengetahui keterkaitan antara penerapan *corporate governance*, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Dari hasil pengujian regresi berganda dengan menggunakan SPSS, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktek manajemen laba. Komisaris independen telah efektif menjalankan tanggung jawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan untuk membatasi manajemen laba di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diajukan melalui keberadaan pihak independen dalam dewan komisaris mampu mengurangi tindak manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan perbankan.
2. Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktek manajemen laba. Keberadaan komite audit kurang mampu mengurangi tindakan manajemen laba pada perusahaan perbankan. Hal ini disebabkan karena jumlah komite audit yang terlalu besar justru menimbulkan sulitnya koordinasi antar anggota komite audit dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
3. Kualitas auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktek manajemen laba. Perusahaan perbankan yang menggunakan KAP *Big Four* lebih efektif dalam meminimalisir kesempatan melakukan manajemen laba.

Hal ini disebabkan karena KAP *Big Four* memiliki kompetensi dan pengalaman yang lebih baik dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.

4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktek manajemen laba. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer dengan proporsi tertentu maka tindakan manajer akan selaras dengan pemegang saham sehingga dapat memperkecil perilaku oportunistik oleh manajer. Namun kepemilikan manajerial tidak merepresentasikan hubungannya dengan manajemen laba.
5. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktek manajemen laba. Semakin tinggi persentase saham perusahaan yang dimiliki institusi maka dapat mengintervensi perusahaan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi. Namun variabel ini tidak secara langsung berhubungan dengan manajemen laba.
6. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktek manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan meningkatkan motivasi untuk melakukan manajemen laba. Ini disebabkan karena perusahaan besar berusaha melakukan manipulasi laba agar biaya politik yang besar dikeluarkan lebih kecil dari yang seharusnya.

5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat berpengaruh pada hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa data sampel laporan keuangan yang tidak konsisten dalam perhitungan saldo salah satu asetnya pada masing-masing periode, sehingga mempersulit perhitungan tabulasi dalam penelitian ini.
2. Variabel *corporate governance* hanya diwakilkan oleh komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit. Perlu adanya indeks tertentu yang mencerminkan praktik *corporate governance* secara lebih tepat.

5.3 Saran

Dari keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan maka dapat diberikan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pengguna laporan keuangan harus lebih waspada dalam membaca dan menggunakan informasi laporan keuangan agar tidak mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Variabel yang termasuk dalam *corporate governance* sebaiknya ditambah dengan variabel tingkat pendidikan komite audit, direksi dan variabel lain yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian dengan survey sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya dan relevan.
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan variabel-variabel baru untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba, seperti asimetri informasi, profitabilitas, pertumbuhan asset dan umur perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adityo, Stefanus Ferdian. 2009. Pengaruh Mekanisme Tata Kelola dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di BEI periode 2004-2006. <http://eprints.unika.ac.id>. Diakses tanggal 18 November 2012

Agraheni Niken Susanti, Rahmawati, Y. Anni Aryani. (2010). “Analisis Pengaruh Corporate Governance Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007”. Simposium Nasional Keuangan I Tahun 2010.

Balsam, Steven. 2003. “*Auditor Industry Specialization and Earnings Quality*”, <http://papers.ssrn.com>. Diakses tanggal 9 November 2012.

Barth, M. E., J. A. Elliott, and M. W. Finn. 1999. Market rewards associated with patterns of increasing earnings. *Journal of Accounting Research* 37 (Autumn): 387–413.

Beattie, V., S. Brown, D. Ewers, B. John, S. Manson, D. Thomas and M. Turner. 1994. Extraordinary items and income smoothing: A positive accounting approach. *Journal of Business Finance dan Accounting*, 216: 0306-686X

Beaver, H. William, and Ellen E. Engel. 1996. *Discretionary Behavior with Respect to Allowances for Loan Losses and the Behavior of Security Prices*. *Journal of Accounting & Economics* Volume 22. Agustus- Desember: 177-206

Belkaoui, Ahmed Riahi. 2006. *Accounting Theory*. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat

Boediono, Gideon SB., 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 Solo tanggal 15 - 16 September 2005

Beiner. S., W. Drobetz, F. Schmid dan H. Zimmermann. 2003. Is Board zise An Independent Corporate Governance Mechanism

Carlson, S.J. and C.T. Bathala., 1997. Ownership differences and firms’ income smoothing behavior. *Journal of Business Finance and Accounting* 24(2) (March): 179-196.

Christiawan, Y.J., Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris, *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 4, No. 2, Nopember 2002: 79 – 92

Collins, J., D. Shackelford and J. Wahlen (1995). Bank Differences in the Coordination of Regulatory Capital, Earnings and Taxes. *Journal of Accounting Research*. 33: 263-291

Crutchley, C. and R. Hansen (1989), "A Test of the Agency Theory of Managerial Ownership, Corporate Leverage and Corporate Dividends", *Financial Management*, Vol. 18, pp. 36-76.

Daniati, Ninna dan Suhairi, 2006. "Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laporan Arus Kas, Laba Kotor dan Size Perusahaan terhadap Expected Return Saham". Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.

Daniri, Mas Achmad. (2006). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: PT Ray Indonesia.

DeFond, M., and C. Park, 1997. Smoothing income in anticipation of future earnings. *Journal of Accounting dan Economics* 23 (2): 115-139.

Dhaliwal, D. S., G. L., Salamon, and E. D. Smith, 1982. The effect of owner versus management control on the choice of accounting methods. *Journal of Accounting and Economics* 4. 41-53.

Faizal, 2004. Analisis agency cost, struktur kepemilikan and mekanisme corporate governance. *Kumpulan Materi Simposium Nasional Akuntansi (SNA) III*. Denpasar Bali. Desember: 83-113

FCGI 2002, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata kelola perusahaan)*, Jilid 2. FCGI, Jakarta.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gumanti, T.A. (2000). Earnings management suatu telaah pustaka. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, vol.2 (2), pp. 104-115.

Handayani, Sri dan Agustono Dwi Rachadi, Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 11, No. 1, April 2009.

Healy, Paul N., dan Wahlen, James N., "A Review of the Earning Management Literature and Its Implication for Standard Settings," *Accounting Horizons* (13, 1999), h.368

Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Auditing No.77*. Jakarta : IAPI.

Ikatan Komite Audit Indonesia. 2004. Komite Audit. <http://www.komiteaudit.org>. Diakses tanggal 9 November 2012.

Isnanta, Rudi. 2008. “Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan”. Jakarta: Universitas Islam Indonesia.

Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. hal. 305-360.

Kartini dan Tulus Arianto, 2008, Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Pertumbuhan Aktiva dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12. No. 1. Januari 2008. Hal. 11 – 21. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Jakarta: KNKG, 2006.

Komite Nasional Kebijakan Governance, (2004). Pedoman Tentang Komisaris Independen. <http://www.governance-indonesia.or.id/main>. Diakses tanggal 18 November 2012.

Koh, P.S, 2001. The impact of institutional investor type on corporate earnings management. *PhD Dissertation*, University of Tasmania.

Lang, M and M. McNichols. 1997. “Institutional Trading, Corporate Earnings and Returns.” Working Paper, University of North Carolina and Stanford University.

Lee, J. and C.W. Park. 2000. “Intraday Stock Price Reactions to Interim-Quarter versus Fourth-Quarter Earnings Announcement.” *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol.27. No.7 & 8. September/ October, p.1027-1046.

Mayangsari, S., Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi Ke- 6, Surabaya. p. 1255-1269, 2003.

Nasution dan Setiawan, 2007. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X.

Nataline. 2007. Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi dan Auditing, Bonus Serta Pengalaman Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. Skripsi. UNNES.

Ningsaptiti, Restie, 2010. Analisis Pengaruh Urusan Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2004. The OECD Principles of Corporate Governance. (Online), ([http:// www.oecd.org](http://www.oecd.org)), diakses tanggal 18 November 2012

Peasnell, KV., PF Pope, and S Young. 2000. *Outside Director, Board Effectiveness, and Earnings Management*. Working Papers from Lancaster University.

Peraturan No: I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 butir 1c Peraturan Bapepam nomor IX.I.5

Rachmawati, Andri dan Hanung Triatmoko. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar.

Sanjaya, I Putu Sugiarta. 2008. Auditor Eksternal, Komite Audit, dan Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 11:97-116.

Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory*. Second Edition. Canada : Prentice-Hall Canada Inc.

Setiawan, Wawan. 2006. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Volume 6 No.2 Agustus: 163-172

Shleifer, A. dan R.W. Vishny. (1997). A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, Vol.52. No.2. Juni, hal.737-783.

Shita, I Gusti Ayu Putu. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Manajemen Laba. <http://eprints.undip.ac.id>. Diakses tanggal 18 November 2012.

Siregar, Sylvia Veronica. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek *Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Laba dan Kekeliruan Penilaian Pasar. Disertasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Sudarmadji, Ardi Murdoko dan Lana Sularto. 2007. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan". *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)* Vol. 2. Auditorium Kampus Gunadarma.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB/1995 tanggal 31 Maret 1995.

Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995

Susiana, Arleen Herawati. 2007. Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X.

Sutrisno. 2002. Studi Manajemen Laba (Earnings Management) : **Evaluasi Pandangan Profesi Akuntansi, Pembentukan dan Motivasinya**. *Kompak*, No. 5, Mei,158-179.

Sri Lastanti, Hexana. 2005. Tinjauan terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Atas Skandal Keuangan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* Vol. 5 No. 1 April 2005. Hal 85-97.

Sulistyanto, Sri. 2008. *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo

Syahyunan, 2004, *Manajemen keuangan I*, USU Press, Medan

Watts, Ross L. and Zimmerman, Jerold L. 1990. *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective* *The Accounting Review*; Jan 1990; 65, 1; ABI/INFORM Global. Hal 131.

Wild, John, et al (terjemahan Bachtar dan Harahap), 2003, *Analisis Laporan Keuangan Edisi Kedelapan*, Jakarta: Salemba Empat

Weisbach, M.S., 1988. Outside directors and CEO turnover. *Journal of Financial Economics* 20, 198–431.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A
DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL

No.	Nama Bank	Kode Bank
1	PT. BANK AGRONIAGA Tbk.	AGRO
2	PT. BANK ICB BUMIPUTERA Tbk.	BABP
3	PT. BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.	BACA
4	PT. BANK EKONOMI RAHARJA Tbk.	BAEK
5	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.	BBCA
6	PT. BANK BUKOPIN Tbk.	BBKP
7	PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk.	BBNI
8	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.	BBNP
9	PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk.	BBRI
10	PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk.	BBTN
11	PT. BANK MUTIARA Tbk.	BCIC
12	PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.	BDMN
13	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk.	BJBR
14	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.	BMRI
15	PT. BANK BUMI ARTA Tbk.	BNBA
16	PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.	BNGA
17	PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk.	BNII
18	PT. BANK PERMATA Tbk.	BNLI
19	PT. BANK SINARMAS Tbk.	BSIM
20	PT. BANK SWADESI Tbk.	BSWD
21	PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.	BTPN
22	PT. BANK VICTORIA INTERNASIONAL Tbk.	BVIC
23	PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.	INPC
24	PT. BANK MEGA Tbk.	MEGA
25	PT. BANK OCBC NISP Tbk.	NISP
26	PT. BANK PAN INDONESIA Tbk.	PNBN

LAMPIRAN B
DATA PERUSAHAAN

No.	Nama Bank	Kode Bank	Tahun	Var. Dependen	Var. Independen						Var. Kontrol
					DACC	INKOM	KA	AUD	KPM	KPI	
1	PT. BANK AGRONIAGA Tbk.	AGRO	2009	66.557.670.824	66,67	3	0	0,00	96,73	28,7235	0,8833
			2010	130.688.004.656	50,00	3	0	0,00	96,75	28,7475	0,9089
2	PT. BANK ICB BUMIPUTERA Tbk.	BABP	2009	89.463.762.788	80,00	4	1	0,00	73,06	29,5777	0,9229
			2010	114.601.664.973	66,67	3	1	0,00	82,74	29,7897	0,9176
3	PT. BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.	BACA	2009	31.106.108.108	66,67	3	0	21,70	61,37	28,8721	0,8542
			2010	32.767.248.855	66,67	3	0	0,00	77,68	29,1125	0,8764
4	PT. BANK EKONOMI RAHARJA Tbk.	BAEK	2009	221.974.045.000	50,00	5	1	0,00	99,96	30,7033	0,9070
			2010	336.039.595.000	50,00	3	1	0,00	99,96	30,7001	0,8930
5	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.	BBCA	2009	5.976.669.685.000	60,00	4	1	0,29	47,15	33,2743	0,9014
			2010	5.976.917.397.000	60,00	4	1	0,29	47,15	33,4131	0,8934
6	PT. BANK BUKOPIN Tbk.	BBKP	2009	778.211.834.000	50,00	4	1	0,22	79,63	31,2466	0,9316
			2010	900.870.689.000	50,00	4	1	0,30	76,75	31,4915	0,9391
7	PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk.	BBNI	2009	5.606.903.667.000	57,14	5	1	0,04	15,98	33,0582	0,9157
			2010	9.314.211.198.000	57,14	4	1	0,03	37,55	33,1468	0,8666
8	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.	BBNP	2009	37.097.175.178	60,00	3	0	0,00	90,68	28,9911	0,9052
			2010	88.633.791.896	60,00	3	0	0,00	90,51	29,2954	0,9024
9	PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk.	BBRI	2009	11.121.196.506.000	66,67	5	1	0,00	56,77	33,3898	0,9140
			2010	16.536.923.399.000	57,14	6	1	0,00	56,75	33,6331	0,9093

10	PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk.	BBTN	2009	753.524.936.000	50,00	4	1	0,00	72,92	31,6992	0,9077
			2010	872.720.855.000	60,00	4	1	0,00	72,92	31,8562	0,9057
11	PT. BANK MUTIARA Tbk.	BCIC	2009	657.184.404.000	33,33	3	0	0,00	100,00	29,6501	0,9244
			2010	405.609.091.000	33,33	3	0	0,00	100,00	30,0091	0,9282
12	PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.	BDMN	2009	2.138.470.357.000	50,00	6	1	0,16	67,63	32,2221	0,8387
			2010	2.951.758.926.000	57,14	6	1	0,16	67,42	32,4035	0,8426
13	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk.	BJBR	2009	605.914.563.000	60,00	4	1	0,00	100,00	31,1095	0,8886
			2010	783.395.865.000	60,00	5	1	0,13	75,00	31,4025	0,8585
14	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.	BMRI	2009	13.176.780.832.000	66,67	4	1	0,00	66,76	33,6089	0,9106
			2010	13.524.364.917.000	57,14	5	1	0,00	66,68	33,7398	0,9065
15	PT. BANK BUMI ARTA Tbk.	BNBA	2009	22.246.594.919	50,00	2	1	0,00	90,90	28,5078	0,8275
			2010	20.717.202.644	50,00	2	1	0,00	90,90	28,6097	0,8367
16	PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.	BNGA	2009	3.098.259.197.000	50,00	7	1	0,00	93,88	32,3048	0,8947
			2010	4.059.178.704.000	50,00	6	1	0,00	96,91	32,5984	0,9037
17	PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk.	BNII	2009	1.544.794.291.000	50,00	4	1	0,00	97,52	31,7413	0,9110
			2010	1.579.241.782.000	57,14	4	1	0,00	97,38	31,9502	0,9007
18	PT. BANK PERMATA Tbk.	BNLI	2009	1.518.054.972.000	50,00	4	1	0,00	89,01	31,6566	0,9125
			2010	1.889.125.736.000	55,56	3	1	0,00	89,03	31,9326	0,8918
19	PT. BANK SINARMAS Tbk.	BSIM	2009	120.316.739.000	66,67	4	0	0,00	100,00	29,7150	0,9289
			2010	161.643.229.000	66,67	4	0	0,01	78,03	30,0498	0,9188
20	PT. BANK SWADESI Tbk.	BSWD	2009	29.439.105.439	60,00	4	1	1,61	93,12	28,0611	0,8033
			2010	18.817.029.218	60,00	4	1	1,61	93,12	28,0823	0,7970
21	PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.	BTPN	2009	550.560.071.000	50,00	5	1	0,82	71,61	30,7344	0,9085
			2010	627.175.116.000	50,00	5	1	0,85	59,68	31,1726	0,8778

22	PT. BANK VICTORIA INTERNASIONAL Tbk.	BVIC	2009	176.781.485.137	66,67	3	0	17,14	55,16	29,6269	0,9145
			2010	305.382.190.721	66,67	3	0	16,10	48,74	29,9636	0,9279
23	PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.	INPC	2009	182.618.058.481	50,00	3	0	0,00	52,62	30,3675	0,9376
			2010	286.188.331.254	50,00	4	0	0,00	52,62	30,4679	0,9382
24	PT. BANK MEGA Tbk.	MEGA	2009	439.583.057.000	66,67	2	1	0,00	57,82	31,3120	0,9142
			2010	639.130.574.000	50,00	3	1	0,00	57,82	31,5745	0,9154
25	PT. BANK OCBC NISP Tbk.	NISP	2009	659.593.341.000	50,00	4	1	0,02	81,90	31,2434	0,8883
			2010	845.992.189.000	42,86	3	1	0,02	81,90	31,4259	0,8981
26	PT. BANK PAN INDONESIA Tbk.	PNBN	2009	1.765.582.342.000	50,00	3	1	0,00	84,40	31,9859	0,8504
			2010	1.507.600.288.000	50,00	3	1	0,00	83,50	32,3219	0,8778

LAMPIRAN C
DATA PERHITUNGAN TA

Kode Bank	Tahun	PPAP	CO	LOAN	NPA	ΔNPA₊₁
AGRO	2009	88.685.294.000	-	1.993.629.864.000	148.596.972.000	32.258.160.000
	2010	209.645.549.000	9.081.378.000	2.069.027.280.000	180.855.132.000	(116.316.703.000)
BABP	2009	138.223.827.000	36.164.880.000	5.326.987.955.000	299.671.644.000	(33.675.302.000)
	2010	100.739.901.000	97.242.739.000	6.129.035.939.000	265.996.342.000	53.169.622.000
BACA	2009	11.036.649.000	-	1.217.151.941.000	7.052.742.000	11.855.252.000
	2010	12.510.655.000	3.861.745.000	1.830.461.369.000	18.907.994.000	(4.746.994.000)
BAEK	2009	141.541.000.000	2.907.000.000	8.662.318.000.000	96.442.000.000	(55.914.000.000)
	2010	149.313.000.000	3.171.000.000	11.507.204.000.000	40.528.000.000	64.003.000.000
BBCA	2009	4.305.608.000.000	345.849.000.000	123.901.269.000.000	903.058.000.000	89.869.000.000
	2010	3.906.411.000.000	254.341.000.000	153.923.157.000.000	992.927.000.000	(5.478.000.000)
BBKP	2009	589.954.000.000	70.840.000.000	24.603.676.000.000	700.397.000.000	279.868.000.000
	2010	774.694.000.000	85.123.000.000	30.173.015.000.000	980.265.000.000	172.385.000.000
BBNI	2009	6.920.455.000.000	3.330.629.000.000	120.843.140.000.000	5.762.245.000.000	(4.070.445.000.000)
	2010	6.957.392.000.000	4.449.090.000.000	136.356.959.000.000	1.691.800.000.000	870.464.000.000
BBNP	2009	23.002.206.000	258.158.000	2.562.721.814.000	46.790.213.000	(22.306.225.000)
	2010	35.166.973.000	634.130.000	3.657.670.165.000	24.483.988.000	17.586.701.000
BBRI	2009	11.279.891.000.000	2.506.104.000.000	205.522.394.000.000	7.231.660.000.000	(2.273.895.000.000)
	2010	13.991.454.000.000	4.964.081.000.000	246.964.238.000.000	4.957.765.000.000	52.343.000.000
BBTN	2009	619.829.000.000	8.014.000.000	38.737.202.000.000	1.303.540.000.000	239.467.000.000
	2010	725.119.000.000	100.019.000.000	48.702.920.000.000	1.543.007.000.000	57.338.000.000

BCIC	2009	1.445.502.000.000	-	4.864.097.000.000	1.828.190.000.000	(261.508.000.000)
	2010	1.289.328.000.000	66.723.000.000	5.012.936.000.000	1.566.682.000.000	(979.719.000.000)
BDMN	2009	2.211.621.000.000	1.895.297.000.000	60.579.191.000.000	2.801.942.000.000	(354.935.000.000)
	2010	2.505.197.000.000	2.187.622.000.000	75.773.522.000.000	2.447.007.000.000	(86.377.000.000)
BJBR	2009	417.043.000.000	229.447.000.000	18.924.987.000.000	370.089.000.000	40.520.000.000
	2010	574.526.000.000	405.879.000.000	22.066.317.000.000	410.609.000.000	(83.889.000.000)
BMRI	2009	12.435.525.000.000	2.223.520.000.000	197.126.229.000.000	6.200.683.000.000	(210.567.000.000)
	2010	11.481.725.000.000	2.921.053.000.000	244.026.984.000.000	5.990.116.000.000	968.129.000.000
BNBA	2009	13.738.678.035	1.803.388.910	974.639.316.676	20.943.076.367	5.429.170.067
	2010	15.709.359.590	2.291.539.500	1.170.144.112.384	26.372.246.434	(8.830.349.430)
BNGA	2009	2.718.177.000.000	852.923.000.000	82.833.022.000.000	2.533.818.000.000	72.966.000.000
	2010	3.271.710.000.000	326.650.000.000	103.621.924.000.000	2.606.784.000.000	665.765.000.000
BNII	2009	870.133.000.000	1.723.205.000.000	37.370.282.000.000	885.492.000.000	689.804.000.000
	2010	1.351.141.000.000	1.316.924.000.000	50.181.865.000.000	1.575.296.000.000	(280.235.000.000)
BNLI	2009	1.612.883.000.000	212.734.000.000	41.470.324.000.000	1.644.440.000.000	(266.879.000.000)
	2010	1.549.061.000.000	553.344.000.000	52.839.987.000.000	1.377.561.000.000	25.647.000.000
BSIM	2009	90.889.000.000	15.981.000.000	5.413.864.000.000	117.546.000.000	(29.198.000.000)
	2010	77.638.000.000	63.015.000.000	7.011.796.000.000	88.348.000.000	2.598.000.000
BSWD	2009	13.673.707.344	10.871.896.792	981.357.559.362	17.862.660.907	20.228.562.397
	2010	20.836.703.423	1.163.711.534	1.071.643.466.543	38.091.223.304	(9.650.831.368)
BTPN	2009	269.025.000.000	52.249.000.000	15.722.830.000.000	80.119.000.000	186.109.000.000
	2010	340.618.000.000	294.646.000.000	23.328.089.000.000	266.228.000.000	(46.891.000.000)
BVIC	2009	136.113.319.000	26.568.553.000	2.849.627.400.000	85.921.952.000	92.226.353.000
	2010	335.671.618.000	13.834.047.000	3.539.002.139.000	178.148.305.000	(40.156.729.000)
INPC	2009	198.485.489.327	1.868.640.681	10.986.322.474.167	380.834.071.646	(92.016.847.197)

	2010	193.661.435.179	34.432.667.642	11.178.851.228.648	288.817.224.449	107.623.566.852
MEGA	2009	287.360.000.000	157.121.000.000	18.639.422.000.000	317.811.000.000	(103.978.000.000)
	2010	278.227.000.000	283.100.000.000	23.891.435.000.000	213.833.000.000	98.384.000.000
NISP	2009	638.218.000.000	29.957.000.000	23.981.196.000.000	758.804.000.000	(131.771.000.000)
	2010	622.365.000.000	151.701.000.000	31.540.561.000.000	627.033.000.000	(108.140.000.000)
PNBN	2009	1.154.324.000.000	1.159.444.000.000	41.121.422.000.000	1.298.531.000.000	1.130.338.000.000
	2010	1.563.457.000.000	462.874.000.000	57.246.019.000.000	2.428.869.000.000	21.012.000.000

LAMPIRAN C
DATA PERHITUNGAN TA

Kode Bank	Tahun	EKUITAS	EKUITAS + PPAP	CO/EP	LOAN/EP	NPA/EP	ΔNPA/EP	PPAP/EP
AGRO	2009	347.894.501.000	436.579.795.000	0,00000	4,56647	0,34037	0,07389	0,20314
	2010	278.286.057.000	487.931.606.000	0,01861	4,24040	0,37066	-0,23839	0,42966
BABP	2009	539.862.949.000	678.086.776.000	0,05333	7,85591	0,44194	-0,04966	0,20384
	2010	713.291.500.000	814.031.401.000	0,11946	7,52924	0,32676	0,06532	0,12375
BACA	2009	504.512.318.000	515.548.967.000	0,00000	2,36089	0,01368	0,02300	0,02141
	2010	543.870.134.000	556.380.789.000	0,00694	3,28994	0,03398	-0,00853	0,02249
BAEK	2009	2.008.270.000.000	2.149.811.000.000	0,00135	4,02934	0,04486	-0,02601	0,06584
	2010	2.302.859.000.000	2.452.172.000.000	0,00129	4,69266	0,01653	0,02610	0,06089
BBCA	2009	27.856.693.000.000	32.162.301.000.000	0,01075	3,85238	0,02808	0,00279	0,13387
	2010	34.107.844.000.000	38.014.255.000.000	0,00669	4,04909	0,02612	-0,00014	0,10276
BBKP	2009	2.536.515.000.000	3.126.469.000.000	0,02266	7,86948	0,22402	0,08952	0,18870
	2010	2.886.947.000.000	3.661.641.000.000	0,02325	8,24030	0,26771	0,04708	0,21157
BBNI	2009	19.143.582.000.000	26.064.037.000.000	0,12779	4,63639	0,22108	-0,15617	0,26552
	2010	33.119.626.000.000	40.077.018.000.000	0,11101	3,40237	0,04221	0,02172	0,17360
BBNP	2009	369.425.867.000	392.428.073.000	0,00066	6,53042	0,11923	-0,05684	0,05862
	2010	515.368.237.000	550.535.210.000	0,00115	6,64384	0,04447	0,03194	0,06388
BBRI	2009	27.257.381.000.000	38.537.272.000.000	0,06503	5,33308	0,18765	-0,05901	0,29270
	2010	36.673.110.000.000	50.664.564.000.000	0,09798	4,87450	0,09785	0,00103	0,27616
BBTN	2009	5.393.125.000.000	6.012.954.000.000	0,00133	6,44229	0,21679	0,03983	0,10308
	2010	6.447.278.000.000	7.172.397.000.000	0,01394	6,79033	0,21513	0,00799	0,10110

BCIC	2009	569.109.000.000	2.014.611.000.000	0,00000	2,41441	0,90747	-0,12981	0,71751
	2010	774.193.000.000	2.063.521.000.000	0,03233	2,42931	0,75923	-0,47478	0,62482
BDMN	2009	15.928.486.000.000	18.140.107.000.000	0,10448	3,33952	0,15446	-0,01957	0,12192
	2010	18.609.028.000.000	21.114.225.000.000	0,10361	3,58874	0,11589	-0,00409	0,11865
BJBR	2009	3.091.543.000.000	3.508.586.000.000	0,06540	5,39391	0,10548	0,01155	0,11886
	2010	4.990.993.000.000	5.565.519.000.000	0,07293	3,96483	0,07378	-0,01507	0,10323
BMRI	2009	35.108.769.000.000	47.544.294.000.000	0,04677	4,14616	0,13042	-0,00443	0,26156
	2010	41.542.808.000.000	53.024.533.000.000	0,05509	4,60215	0,11297	0,01826	0,21654
BNBA	2009	414.610.174.940	428.348.852.975	0,00421	2,27534	0,04889	0,01267	0,03207
	2010	434.659.650.135	450.369.009.725	0,00509	2,59819	0,05856	-0,01961	0,03488
BNGA	2009	11.210.407.000.000	13.928.584.000.000	0,06124	5,94698	0,18191	0,00524	0,19515
	2010	13.767.417.000.000	17.039.127.000.000	0,01917	6,08141	0,15299	0,03907	0,19201
BNII	2009	5.258.959.000.000	6.129.092.000.000	0,28115	6,09720	0,14447	0,11255	0,14197
	2010	7.229.704.000.000	8.580.845.000.000	0,15347	5,84813	0,18358	-0,03266	0,15746
BNLI	2009	4.835.512.000.000	6.448.395.000.000	0,03299	6,43111	0,25502	-0,04139	0,25012
	2010	7.917.273.000.000	9.466.334.000.000	0,05845	5,58188	0,14552	0,00271	0,16364
BSIM	2009	571.429.000.000	662.318.000.000	0,02413	8,17412	0,17748	-0,04408	0,13723
	2010	911.494.000.000	989.132.000.000	0,06371	7,08884	0,08932	0,00263	0,07849
BSWD	2009	302.478.620.760	316.152.328.104	0,03439	3,10407	0,05650	0,06398	0,04325
	2010	318.715.237.151	339.551.940.574	0,00343	3,15605	0,11218	-0,02842	0,06137
BTPN	2009	2.038.313.000.000	2.307.338.000.000	0,02264	6,81427	0,03472	0,08066	0,11660
	2010	4.217.291.000.000	4.557.909.000.000	0,06464	5,11816	0,05841	-0,01029	0,07473
BVIC	2009	629.350.354.000	765.463.673.000	0,03471	3,72275	0,11225	0,12048	0,17782
	2010	742.662.611.000	1.078.334.229.000	0,01283	3,28192	0,16521	-0,03724	0,31129
INPC	2009	963.068.749.801	1.161.554.239.128	0,00161	9,45829	0,32787	-0,07922	0,17088

	2010	1.054.457.558.097	1.248.118.993.276	0,02759	8,95656	0,23140	0,08623	0,15516
MEGA	2009	3.403.242.000.000	3.690.602.000.000	0,04257	5,05051	0,08611	-0,02817	0,07786
	2010	4.366.219.000.000	4.644.446.000.000	0,06095	5,14409	0,04604	0,02118	0,05991
NISP	2009	4.137.300.000.000	4.775.518.000.000	0,00627	5,02170	0,15889	-0,02759	0,13364
	2010	4.532.506.000.000	5.154.871.000.000	0,02943	6,11859	0,12164	-0,02098	0,12073
PNBN	2009	10.741.780.000.000	11.896.104.000.000	0,09746	3,45671	0,10916	0,09502	0,09703
	2010	12.239.609.000.000	13.803.066.000.000	0,03353	4,14734	0,17597	0,00152	0,11327

LAMPIRAN D
DATA PERHITUNGAN DACC

Kode Bank	Tahun	KCO	KLOAN	KNPA	KΔNPA_t	NDA	DACC
AGRO	2009	-	(31.898.077.824)	63.896.697.960	(9.870.996.960)	22.127.623.176	66.557.670.824
	2010	(1.298.637.054)	(33.104.436.480)	77.767.706.760	35.592.911.118	78.957.544.344	130.688.004.656
BABP	2009	(5.171.577.840)	(85.231.807.280)	128.858.806.920	10.304.642.412	48.760.064.212	89.463.762.788
	2010	(13.905.711.677)	(98.064.575.024)	114.378.427.060	(16.269.904.332)	(13.861.763.973)	114.601.664.973
BACA	2009	-	(19.474.431.056)	3.032.679.060	(3.627.707.112)	(20.069.459.108)	31.106.108.108
	2010	(552.229.535)	(29.287.381.904)	8.130.437.420	1.452.580.164	(20.256.593.855)	32.767.248.855
BAEK	2009	(415.701.000)	(138.597.088.000)	41.470.060.000	17.109.684.000	(80.433.045.000)	221.974.045.000
	2010	(453.453.000)	(184.115.264.000)	17.427.040.000	(19.584.918.000)	(186.726.595.000)	336.039.595.000
BBCA	2009	(49.456.407.000)	(1.982.420.304.000)	388.314.940.000	(27.499.914.000)	(1.671.061.685.000)	5.976.669.685.000
	2010	(36.370.763.000)	(2.462.770.512.000)	426.958.610.000	1.676.268.000	(2.070.506.397.000)	5.976.917.397.000
BBKP	2009	(10.130.120.000)	(393.658.816.000)	301.170.710.000	(85.639.608.000)	(188.257.834.000)	778.211.834.000
	2010	(12.172.589.000)	(482.768.240.000)	421.513.950.000	(52.749.810.000)	(126.176.689.000)	900.870.689.000
BBNI	2009	(476.279.947.000)	(1.933.490.240.000)	2.477.765.350.000	1.245.556.170.000	1.313.551.333.000	5.606.903.667.000
	2010	(636.219.870.000)	(2.181.711.344.000)	727.474.000.000	(266.361.984.000)	(2.356.819.198.000)	9.314.211.198.000
BBNP	2009	(36.916.594)	(41.003.549.024)	20.119.791.590	6.825.704.850	(14.094.969.178)	37.097.175.178
	2010	(90.680.590)	(58.522.722.640)	10.528.114.840	(5.381.530.506)	(53.466.818.896)	88.633.791.896
BBRI	2009	(358.372.872.000)	(3.288.358.304.000)	3.109.613.800.000	695.811.870.000	158.694.494.000	11.121.196.506.000
	2010	(709.863.583.000)	(3.951.427.808.000)	2.131.838.950.000	(16.016.958.000)	(2.545.469.399.000)	16.536.923.399.000
BBTN	2009	(1.146.002.000)	(619.795.232.000)	560.522.200.000	(73.276.902.000)	(133.695.936.000)	753.524.936.000
	2010	(14.302.717.000)	(779.246.720.000)	663.493.010.000	(17.545.428.000)	(147.601.855.000)	872.720.855.000

BCIC	2009	-	(77.825.552.000)	786.121.700.000	80.021.448.000	788.317.596.000	657.184.404.000
	2010	(9.541.389.000)	(80.206.976.000)	673.673.260.000	299.794.014.000	883.718.909.000	405.609.091.000
BDMN	2009	(271.027.471.000)	(969.267.056.000)	1.204.835.060.000	108.610.110.000	73.150.643.000	2.138.470.357.000
	2010	(312.829.946.000)	(1.212.376.352.000)	1.052.213.010.000	26.431.362.000	(446.561.926.000)	2.951.758.926.000
BJBR	2009	(32.810.921.000)	(302.799.792.000)	159.138.270.000	(12.399.120.000)	(188.871.563.000)	605.914.563.000
	2010	(58.040.697.000)	(353.061.072.000)	176.561.870.000	25.670.034.000	(208.869.865.000)	783.395.865.000
BMRI	2009	(317.963.360.000)	(3.154.019.664.000)	2.666.293.690.000	64.433.502.000	(741.255.832.000)	13.176.780.832.000
	2010	(417.710.579.000)	(3.904.431.744.000)	2.575.749.880.000	(296.247.474.000)	(2.042.639.917.000)	13.524.364.917.000
BNBA	2009	(257.884.614)	(15.594.229.067)	9.005.522.838	(1.661.326.041)	(8.507.916.884)	22.246.594.919
	2010	(327.690.149)	(18.722.305.798)	11.340.065.967	2.702.086.926	(5.007.843.054)	20.717.202.644
BNGA	2009	(121.967.989.000)	(1.325.328.352.000)	1.089.541.740.000	(22.327.596.000)	(380.082.197.000)	3.098.259.197.000
	2010	(46.710.950.000)	(1.657.950.784.000)	1.120.917.120.000	(203.724.090.000)	(787.468.704.000)	4.059.178.704.000
BNII	2009	(246.418.315.000)	(597.924.512.000)	380.761.560.000	(211.080.024.000)	(674.661.291.000)	1.544.794.291.000
	2010	(188.320.132.000)	(802.909.840.000)	677.377.280.000	85.751.910.000	(228.100.782.000)	1.579.241.782.000
BNLI	2009	(30.420.962.000)	(663.525.184.000)	707.109.200.000	81.664.974.000	94.828.028.000	1.518.054.972.000
	2010	(79.128.192.000)	(845.439.792.000)	592.351.230.000	(7.847.982.000)	(340.064.736.000)	1.889.125.736.000
BSIM	2009	(2.285.283.000)	(86.621.824.000)	50.544.780.000	8.934.588.000	(29.427.739.000)	120.316.739.000
	2010	(9.011.145.000)	(112.188.736.000)	37.989.640.000	(794.988.000)	(84.005.229.000)	161.643.229.000
BSWD	2009	(1.554.681.241)	(15.701.720.950)	7.680.944.190	(6.189.940.093)	(15.765.398.095)	29.439.105.439
	2010	(166.410.749)	(17.146.295.465)	16.379.226.021	2.953.154.399	2.019.674.205	18.817.029.218
BTPN	2009	(7.471.607.000)	(251.565.280.000)	34.451.170.000	(56.949.354.000)	(281.535.071.000)	550.560.071.000
	2010	(42.134.378.000)	(373.249.424.000)	114.478.040.000	14.348.646.000	(286.557.116.000)	627.175.116.000
BVIC	2009	(3.799.303.079)	(45.594.038.400)	36.946.439.360	(28.221.264.018)	(40.668.166.137)	176.781.485.137
	2010	(1.978.268.721)	(56.624.034.224)	76.603.771.150	12.287.959.074	30.289.427.279	305.382.190.721
INPC	2009	(267.215.617)	(175.781.159.587)	163.758.650.808	28.157.155.242	15.867.430.846	182.618.058.481

	2010	(4.923.871.473)	(178.861.619.658)	124.191.406.513	(32.932.811.457)	(92.526.896.075)	286.188.331.254
MEGA	2009	(22.468.303.000)	(298.230.752.000)	136.658.730.000	31.817.268.000	(152.223.057.000)	439.583.057.000
	2010	(40.483.300.000)	(382.262.960.000)	91.948.190.000	(30.105.504.000)	(360.903.574.000)	639.130.574.000
NISP	2009	(4.283.851.000)	(383.699.136.000)	326.285.720.000	40.321.926.000	(21.375.341.000)	659.593.341.000
	2010	(21.693.243.000)	(504.648.976.000)	269.624.190.000	33.090.840.000	(223.627.189.000)	845.992.189.000
PNBN	2009	(165.800.492.000)	(657.942.752.000)	558.368.330.000	(345.883.428.000)	(611.258.342.000)	1.765.582.342.000
	2010	(66.190.982.000)	(915.936.304.000)	1.044.413.670.000	(6.429.672.000)	55.856.712.000	1.507.600.288.000

LAMPIRAN E
HASIL REGRESI

Hasil Statistik Deskriptif:

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INKOM	52	33.33	80.00	55.9863	8.78595
KA	52	2.00	7.00	3.8846	1.09641
AUD	52	.00	1.00	.7308	.44789
KPM	52	.00	21.70	1.1827	4.33432
KPI	52	15.98	100.00	76.4244	19.45318
SIZE	52	28.06	33.74	31.0053	1.59340
LEV	52	.80	.94	.8948	.03316
DACC	52	18817029218	2.E13	2.22E12	3.836E12
Valid N (listwise)	52				

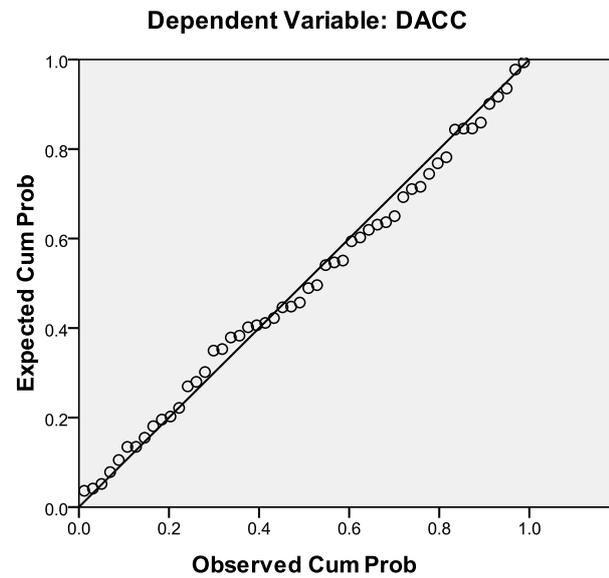
Hasil Statistik Deskriptif Frekuensi:

AUD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	14	26.9	26.9	26.9
1	38	73.1	73.1	100.0
Total	52	100.0	100.0	

Hasil Uji Normalitas:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

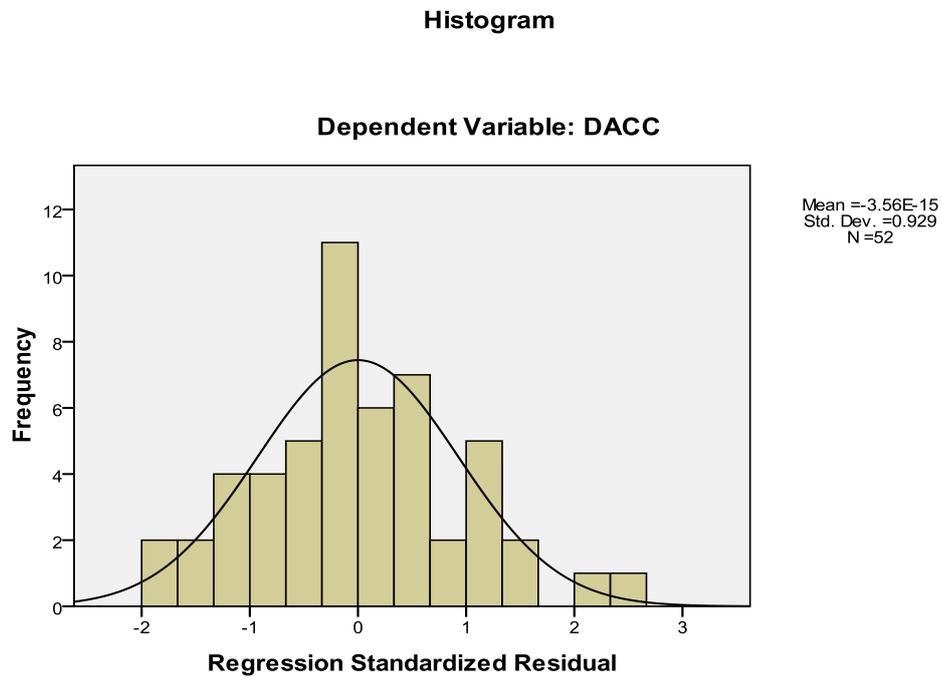


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.37511492
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		.365
Asymp. Sig. (2-tailed)		.999

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Hasil Uji Multikolonieritas:

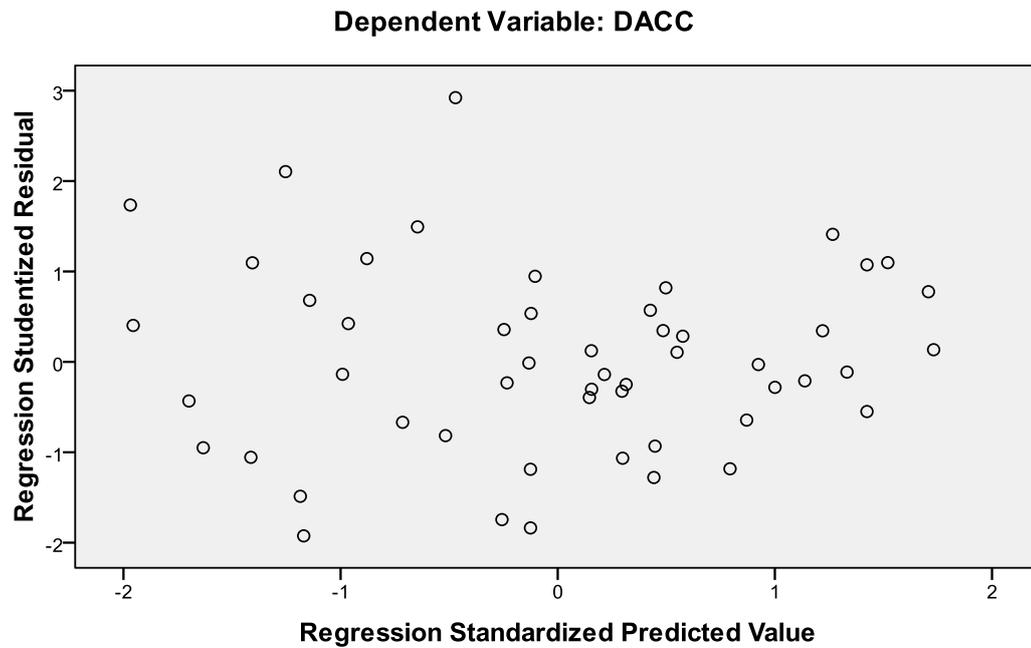
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.858	3.097		-1.892	.065		
	INKOM	-.882	.372	-.078	-2.371	.022	.857	1.167
	KA	.095	.064	.056	1.474	.148	.640	1.563
	AUD	-.424	.186	-.103	-2.281	.027	.461	2.169
	KPM	-.044	.075	-.019	-.586	.561	.905	1.105
	KPI	.095	.207	.017	.458	.649	.693	1.443
	SIZE	1.157	.063	.998	18.307	.000	.315	3.172
	LEV	.128	2.118	.002	.060	.952	.648	1.542

a. Dependent Variable: DACC

Hasil Uji Heteroskedastisitas:

Scatterplot



Hasil Uji Autokorelasi:

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.02724
Cases < Test Value	26
Cases >= Test Value	26
Total Cases	52
Number of Runs	32
Z	1.401
Asymp. Sig. (2-tailed)	.161

a. Median

Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	166.802	7	23.829	146.102	.000 ^a
	Residual	7.176	44	.163		
	Total	173.978	51			

a. Predictors: (Constant), LEV, KA, INKOM, KPM, KPI, AUD, SIZE

b. Dependent Variable: DACC

Koefisien Determinasi:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.979 ^a	.959	.952	.40385

a. Predictors: (Constant), LEV, KA, INKOM, KPM, KPI, AUD, SIZE

b. Dependent Variable: DACC

Hasil Uji T:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.858	3.097		-1.892	.065
	INKOM	-.882	.372	-.078	-2.371	.022
	KA	.095	.064	.056	1.474	.148
	AUD	-.424	.186	-.103	-2.281	.027
	KPM	-.044	.075	-.019	-.586	.561
	KPI	.095	.207	.017	.458	.649
	SIZE	1.157	.063	.998	18.307	.000
	LEV	.128	2.118	.002	.060	.952

a. Dependent Variable: DACC

